



Katalog BPS : 4102002.12.17
Nomor Publikasi : 1217.14.23

ANALISIS SITUASI PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN SAMOSIR 2013

<https://samosirkab.bps.go.id>

Badan Pusat Statistik Kabupaten Samosir
/BPS - Statistics of Samosir Regency

ANALISIS SITUASI PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN SAMOSIR 2013

Katalog BPS : 4102002.12.17

No. Publikasi : 12.17.14.23

Ukuran Buku : 15 cm x 21 cm

Jumlah halaman : x + 76 halaman

Naskah:

Seksi Neraca Wilayah Dan Analisis Statistik
Badan Pusat Statistik Kabupaten Samosir

Gambar Kulit :

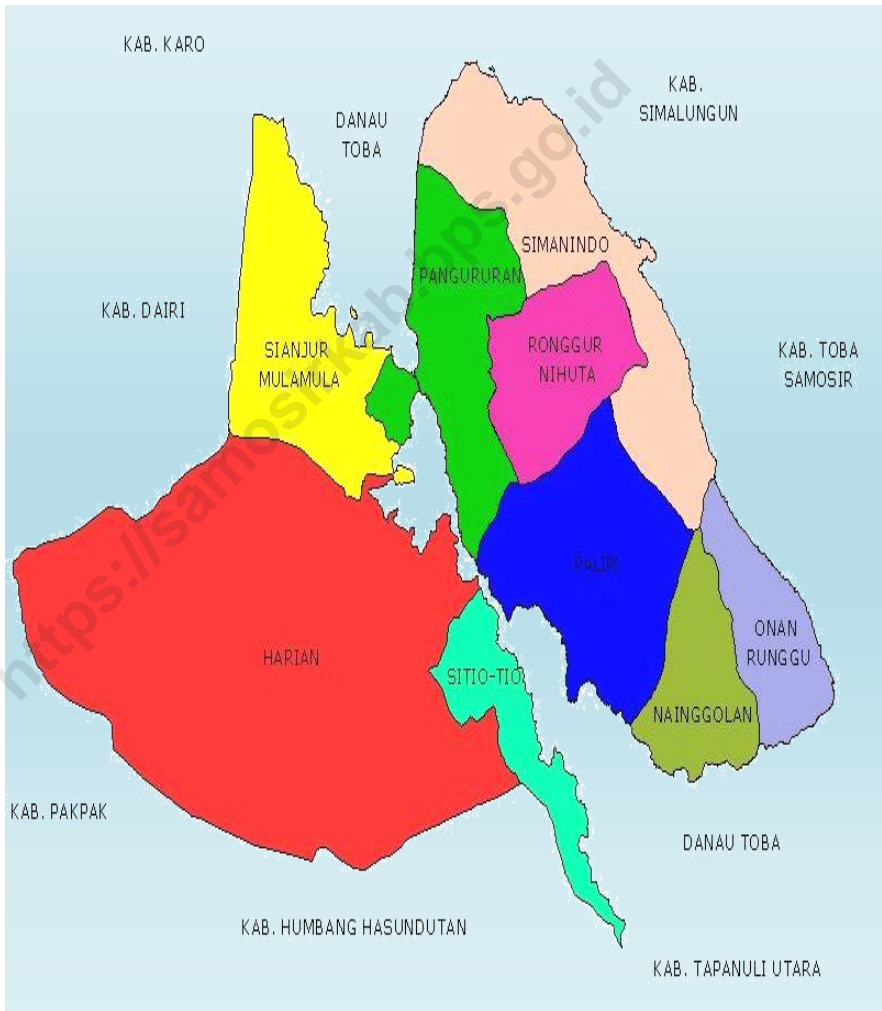
Seksi Neraca Wilayah Dan Analisis Statistik
Badan Pusat Statistik Kabupaten Samosir

Diterbitkan Oleh :

Badan Pusat Statistik Kabupaten Samosir

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

PETA KABUPATEN SAMOSIR



KATA PENGANTAR

Publikasi Analisis Situasi Pembangunan Manusia (ASPM) Kabupaten Samosir tahun 2013 menyajikan informasi dan analisis tentang situasi pembangunan manusia ditinjau dari aspek pendidikan (angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah), kesehatan (angka harapan hidup), daya beli masyarakat, status pembangunan manusia, peringkat IPM Kabupaten Samosir baik secara regional maupun nasional, dan hubungan antara IPM dengan tingkat perekonomian Kabupaten Samosir.

Publikasi ini tidak hanya menggambarkan kondisi tahun 2013 saja, namun juga dibandingkan dengan kondisi tahun 2006, sehingga dapat melihat perkembangan pembangunan manusia selama periode 2006-2013. Informasi dan analisis data, grafik, tabel perkembangan pencapaian IPM di Kabupaten Samosir beserta komponen-komponennya selama tahun 2006-2013 secara sederhana sehingga diharapkan dapat dipahami dengan mudah oleh pengguna data.

Diharapkan dengan terbitnya publikasi ini maka kebutuhan ketersediaan data khususnya data pembangunan manusia dapat dipenuhi dengan baik. Kepada semua pihak yang telah membantu kami untuk terwujudnya publikasi ini, baik langsung maupun tidak langsung diucapkan terimakasih

Pangururan, Desember 2014
Badan Pusat Statistik
Kabupaten Samosir
Kepala,



Ir. Rudy Harlon Harianja
NIP. 19660324199203 1 003

DAFTAR ISI

	Hal
PETA KABUPATEN SAMOSIR	iii
KATA SAMBUTAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN	2
1.1. Latar Belakang.....	2
1.2. Maksud dan Tujuan	4
1.3. Sumber Data	5
1.4. Sistematika Penyajian	6
BAB II URAIAN TEORITIS	9
2.1. Konsep dan Defenisi.....	9
2.1.1. Rumahtangga dan Anggota Rumahtangga	10
2.1.2. Pendidikan.....	11
2.1.3. Perumahan dan Lingkungan.....	12
2.1.4. Konsumsi/ Pengeluaran.....	12
2.2. Kedudukan IPM dalam Pembangunan Daerah	14
2.3. Pemanfaatan IPM dalam Perencanaan Pembangunan	16
BAB III METODE PENGHITUNGAN IPM	18
3.1. Komponen-Komponen IPM.....	18
3.2. Tahapan Penghitungan IPM.....	20
3.3. Penentuan Status IPM.....	21

BAB IV	GAMBARAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR	25
4.1.	Letak dan Geografis.....	25
4.2.	Kependudukan	26
4.2.1.	Jumlah dan Persebaran Penduduk	27
4.2.2.	Komposisi Umur	29
4.3.	Tingkat Pendidikan	31
4.3.1.	Angka Partisipasi sekolah	31
4.3.2.	Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan ..	33
4.4.	Tingkat Kesehatan	35
4.4.1.	Penyediaan Sarana Kesehatan.....	35
4.4.2.	Tenaga Kesehatan Penolong Kelahiran.....	36
4.5.	Perekonomian	37
BAB V	ANALISIS SITUASI PEMBANGUNAN MANUSIA	42
5.1.	Komponen Indeks Pembangunan Manusia.....	42
5.1.1.	Indeks Harapan Hidup Kabupaten Samosir	42
5.1.2.	Indeks Pengetahuan Kabupaten Samosir	44
5.1.3.	Tingkat Daya Beli Kabupaten Samosir.....	51
5.2.	Status Pembangunan Manusia	53
BAB VI	KESIMPULAN	57
LAMPIRAN	60

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2013	72
Tabel 1.2.	Jumlah Penduduk, Jenis Kelamin, dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan Tahun 2013	73
Tabel 1.3.	Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur, dan Jenis Kelamin Tahun 2013	74
Tabel 1.4.	Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas Menurut Status Perkawinan dan Jenis Kelamin Tahun 2013	75
Tabel 1.5.	Persentase Penduduk Kabupaten Samsir Usia 10 Tahun ke Atas Menurut Partisipasi Sekolah dan Jenis Kelamin Tahun 2013	76
Tabel 1.6.	Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Keatas Menurut Ijazah/STTB Tertinggi yang dimiliki dan Jenis Kelamin Tahun 2013	77
Tabel 1.7.	Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai Tempat Tinggal (m ²) Tahun 2013	78
Tabel 1.8.	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Lantai Terluas dari Tempat Tinggal Tahun 2006-2013	79
Tabel 1.9.	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Dinding Terluas Tahun 2007-2013	80
Tabel 1.10	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Utama Air Minum Tahun 2007-2013	81

Tabel 1.11	Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Pembuangan Akhir Tinja Tahun 2013	82
Tabel 1.12	Persentase Rumah Tangga Menurut Pembuangan Air Besar Tahun 2013	83
Tabel 2.1.	Angka Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Utara..... Tahun 2007-2013	84
Tabel 2.2.	Angka Melek Huruf Menurut Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Utara Tahun 2007- 2013	85
Tabel 2.3.	Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Menurut Kabupaten/ Kota di Propinsi Sumatera Utara Tahun 2007- 2013	86
Tabel 2.4.	Pengeluaran Riil Per Kapita yang Disesuaikan Menurut Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Utara Tahun 2007- 2013	87
Tabel 2.5.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota Di Propinsi Sumatera Utara Tahun 2007- 2013	88
Tabel 2.6.	Peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Utara secara Nasional dan Propinsi Sumatera Utara. Tahun 2009- 2013	89
Tabel 2.7.	Reduksi <i>Shortfall</i> Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Sumatera Utara secara Nasional dan propinsi Sumatera Utara Tahun 2007- 2013	90

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 2.1 Hubungan Antara Pembangunan Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi.....	18
Gambar 3.1 Status Indeks Pembangunan Manusia.....	38
Gambar 4.1 Distribusi Persentase Penduduk Kabupaten Samsir Tahun 2013.....	45
Gambar 4.2 Komposisi Penduduk Kabupaten Samsir Menurut Kelompok Umur Tahun 2007-2013.....	47
Gambar 4.3 Persentase Penduduk Kabupaten Samsir dan Sumatera Utara Yang Masih Sekolah menurut Kelompok Umur Tahun 2013.....	49
Gambar 4.4 Tingkat Pendidikan tertinggi yang ditamatkan Penduduk Kabupaten Samsir usia 10 tahun ke atas Tahun 2013	51
Gambar 4.5 Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Samsir Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) tahun 2013.....	53
Gambar 4.6 Perkembangan Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Samsir ADH Konstan 2000 Tahun 2006 -2013.....	54
Gambar 4.7 Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Samsir Tahun 2006 – 2013.....	55
Gambar 5.1 Angka Harapan Hidup Kabupaten Samsir dan Provinsi Sumatera Utara 2006-2013	59
Gambar 5.2 Perbandingan Angka Melek Huruf Penduduk Usia 10 Tahun keatas Kabupaten Samsir dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2007 – 2013.....	61
Gambar 5.3 Persentase Penduduk Usia 10 tahun keatas menurut Ijazah tertinggi yang dimiliki/ pendidikan yang ditamatkan Tahun 2013.....	63
Gambar 5.4 Tingkat Daya Beli Penduduk Kabupaten Samsir dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2007-2013	67
Gambar 5.5 IPM Kabupaten Samsir dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2007-2013.....	69

PENDAHULUAN

B A B 1

<https://samosirkab.bps.go.id/>

PENDAHULUAN



1

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang salah satu sasaran pembangunan yang akan dicapai adalah membaiknya pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah khususnya pada periode RPJMN tahap II (2010-2014), maka usaha-usaha perbaikan dan penyempurnaan proses perencanaan pembangunan daerah merupakan salah satu faktor kunci untuk diperhatikan.

Desentralisasi pembangunan yang biasa disebut dengan otonomi daerah memberikan peluang kepada Kabupaten/ Kota untuk melakukan perencanaan program kerja dan pencapaian tujuan pembangunan daerah. Kabupaten Samosir yang merupakan kabupaten muda yang terbentuk sejak tahun 2003, memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan berbagai langkah representatif dalam mengambil kebijakan yang bermanfaat bagi pengembangan Kabupaten Samosir.

Pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Samosir memerlukan perencanaan yang matang. Perencanaan pembangunan daerah harus didukung oleh data yang berkualitas. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan data akan semakin meningkat.

Data yang mewakili keadaan situasional Kabupaten Samosir akan sangat bermanfaat terhadap pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam pembangunan di berbagai sektor. Keadaan situasional pembangunan manusia sebagai salah satu alat ukur pembangunan yang berkesinambungan yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mencapai standar hidup layak.

Adapun data pendukung sebagai komponen dasar pembangunan manusia yang sangat diperlukan dalam perencanaan daerah antara lain Angka Harapan Hidup (AHH) yang tinggi, harus didukung oleh tingkat kesehatan yang baik, status gizi baik dan prasarana lingkungan/sanitasi yang sehat. Upaya secara optimal juga dapat dilakukan melalui peningkatan mutu pengetahuan dan keterampilan yang diprioritaskan melalui peningkatan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah.

Demi mencapai keberhasilan pembangunan di Kabupaten Samosir maka diperlukan ketersediaan data yang dapat mengukur perkembangan kualitas sumber daya manusia melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Untuk melihat perkembangan dan hubungan IPM dengan pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat, maka pemerintah Kabupaten Samosir melalui Bappeda melakukan kerjasama dalam rangka penyusunan Publikasi ASPM (Analisis Situasi Pembangunan Manusia) keadaan tahun 2012. Melalui publikasi ASPM tahun 2012, diharapkan pemerintah selaku pengambil kebijakan dapat menggunakan data IPM sebagai dasar pengambilan setiap keputusan.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Analisis Situasi Pembangunan Manusia (ASPM) Kabupaten Samosir tahun 2012 ini dimaksudkan untuk melihat perkembangan pembangunan manusia di Kabupaten Samosir tahun 2006-2012 sebagai suatu tujuan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan manusia. Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan publikasi ini, antara lain :

- a. Menyajikan data dan informasi yang akurat, lengkap, dan terkini mengenai pembangunan manusia di Kabupaten Samosir yang dilengkapi dengan indikator-indikator relevan,
- b. Menyediakan data mengenai pembangunan manusia yang bermanfaat bagi pemerintah daerah umumnya dan pengguna data khususnya,
- c. Sebagai dasar perencanaan pada tingkat makro, terutama terkait dengan masalah pendidikan dan kesehatan masyarakat,
- d. Menyediakan pembahasan mengenai keterkaitan pembangunan manusia dengan dimensi lain pembangunan seperti pertumbuhan ekonomi,
- e. Sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir mengenai kebijakan anggaran, terutama terkait dengan kebijakan alokasi bagi pelayanan publik untuk bidang pendidikan dan kesehatan serta membandingkan hasil yang dicapai dengan kabupaten lain di Propinsi Sumatera Utara.

1.3 SUMBER DATA

Data yang digunakan untuk keperluan penyusunan Analisis Situasi Pembangunan Manusia (ASPM) Kabupaten Samosir ini sebagian besar menggunakan data primer, yakni data yang dikumpulkan langsung oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Samosir melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) triwulanan. Cakupan Susenas relatif luas, meliputi bidang pendidikan, kesehatan dan gizi, perumahan, sosial budaya, konsumsi atau pengeluaran rumah tangga dan sosial ekonomi lainnya yang disebut dengan data KOR (keterangan pokok) dan data MODUL (keterangan khusus). Pelaksanaan Susenas ini dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia dengan jumlah sampel berbeda-beda yang tersebar di seluruh propinsi dan kabupaten. Sampel Susenas Kabupaten Samosir untuk tahun 2012 tersebar di enam kecamatan yang dibagi habis untuk beberapa desa terpilih, dan setiap desa dibagi menjadi blok sensus. Total keseluruhan sampel KOR untuk Kabupaten Samosir sebanyak 12 Blok Sensus dengan jumlah responden sebanyak 120 RT.

Untuk meningkatkan validitas data maka pengolahan data Susenas dilakukan dengan melalui beberapa tahapan yaitu :

- a. **Receiving**, yang merupakan proses pemeriksaan kelengkapan jumlah dokumen hasil pencacahan di lapangan.
- b. **Editing dan coding**, yang merupakan proses pemeriksaan daftar isian (kuesioner) hasil pencacahan di lapangan. Pada tahap ini diadakan pemeriksaan isian mengenai kelengkapan isian dan konsistensi antar

isian. Selain itu juga dilakukan pengisian kode-kode tertentu sesuai keperluan pengolahan.

- c. **Entry**, yang merupakan proses perekaman data atau memindahkan data pada kuesioner ke media komputer.
- d. **Validasi**, proses ini merupakan pengecekan kembali mengenai kewajaran dan konsistensi antar isian yang dilakukan oleh media komputer.
- e. **Tabulasi**, proses ini merupakan tahap akhir pengolahan data Susenas, dimana tahap ini sangat penting dan menjadi dasar dalam proses analisis terhadap data Susenas yang dihasilkan.

1.4 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Publikasi Analisis Situasi Pembangunan Manusia (ASPM) Kabupaten Samosir Tahun 2012 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

❖ BAB I : Pendahuluan

Memuat latar belakang, maksud dan tujuan, sumber data serta sistematika penyajian data dari publikasi ASPM tahun 2012.

❖ BAB II : Uraian Teoritis

Memuat paradigma umum pembangunan, pengertian indikator, indeks, konsep Pembangunan Manusia. Berdasarkan uraian pada bab ini diharapkan pembaca dapat memahami apa yang dimaksud dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta komponen pendukungnya.

❖ **BAB III : Metode Penghitungan IPM**

Berisi Komponen-komponen IPM, metode penghitungan IPM, serta metode analisis yang digunakan dalam penentuan status pembangunan manusia Kabupaten Samosir.

❖ **BAB IV : Gambaran Umum Kabupaten Samosir**

Memuat penjelasan gambaran umum kondisi Kabupaten Samosir serta analisis terhadap komponen-komponen penyusun IPM.

❖ **BAB V : Analisis Situasi Pembangunan Manusia**

Bagian utama yang mengulas tentang komponen IPM, status IPM, dan hubungan antara IPM dan perekonomian di Kabupaten Samosir.

❖ **Bab VI : Kesimpulan**

Memuat beberapa kesimpulan dari seluruh ulasan/ penjelasan mengenai Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kabupaten Samosir tahun 2012.

❖ **LAMPIRAN**

Memuat tabel-tabel dasar yang penting dan memberikan gambaran yang lebih jauh tentang kondisi umum Kabupaten Samosir selama tahun 2012.

URAIAN TEORITIS

B A B 2

<https://samosirkab.bpk.go.id>

URAIAN TEORITIS

2

2.1 KONSEP DAN DEFENISI

UNDP mendefinisikan pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk. Sesuai dengan pengertian dalam *HDI/IPM*, bahwa manusia lebih dimaksudkan sebagai tujuan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan manusia. Maka pembangunan manusia adalah merupakan suatu proses yang terus-menerus dilakukan melalui pembangunan untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk.

Demi menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia, empat hal pokok yang perlu diperhatikan adalah produktivitas, pemerataan, kesinambungan, pemberdayaan (*UNDP, 1995 : 12*). Secara ringkas, empat hal pokok tersebut mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Produktivitas

Penduduk harus diberdayakan untuk meningkatkan produktivitas dan untuk berpartisipasi penuh dalam proses penciptaan pendapatan (nafkah) dan lapangan pekerjaan. Pembangunan ekonomi, yang demikian merupakan himpunan bagian dari model pembangunan manusia.

2. Pemerataan

Penduduk harus memiliki kesempatan/peluang yang sama untuk mendapatkan akses terhadap semua sumber daya ekonomi dan sosial. Semua hambatan yang memperkecil kesempatan untuk memperoleh akses tersebut harus dihapus, sehingga mereka dapat mengambil manfaat dari kesempatan yang ada dan berpartisipasi dalam kegiatan produktif yang dapat meningkatkan kualitas hidup.

3. Kestinambungan

Akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial harus dipastikan tidak hanya untuk generasi-generasi yang akan datang. Semua sumber daya fisik, manusia, dan lingkungan harus selalu diperbaharui (*replenished*).

4. Pemberdayaan

Penduduk harus berpartisipasi penuh dalam keputusan dan proses yang akan menentukan (bentuk/arah) kehidupan mereka, serta untuk berpartisipasi dan mengambil manfaat dari proses pembangunan.

2.1.1 Rumahtangga dan Anggota Rumahtangga

Rumahtangga dalam hal ini dibedakan menjadi dua, yaitu rumahtangga biasa dan rumahtangga khusus :

- 1). **Rumahtangga biasa** adalah seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus, dan biasanya makan bersama dari satu dapur. Yang dimaksud dengan makan dari satu dapur adalah jika penggunaan kebutuhan sehari-harinya dikelola

bersama menjadi satu. Selain rumahtangga biasa yang terdiri dari bapak, ibu, dan anak, yang juga dianggap sebagai rumahtangga biasa antara lain :

- Seseorang yang menyewa kamar atau sebagian bangunan sensus dan mengurus makanannya secara sendiri.
- Keluarga yang tinggal terpisah di dua bangunan sensus tetapi makannya dari satu dapur asal kedua bangunan tersebut masih dalam satu segmen.
- Suatu rumahtangga yang menerima pondokan dengan makan (indekos) yang pemondoknya kurang dari 10 orang.
- Pengurus asrama, panti asuhan, lembaga pemasyarakatan dan sejenisnya yang tinggal sendiri maupun bersama anak, istri serta anggota rumahtangga lainnya, makan dari satu dapur yang terpisah dari lembaga yang diurusnya.
- Masing-masing orang yang bersama-sama menyewa kamar atau sebagian bangunan sensus tetapi mengurus makannya sendiri.

2). **Rumahtangga khusus**, yaitu orang-orang yang tinggal di asrama, tangsi, panti asuhan, lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan, sekelompok orang yang mondok dengan makan (indekos) dan berjumlah 10 orang atau lebih, tidak dicakup.

2.1.2 Pendidikan

Sekolah adalah sekolah formal mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, termasuk juga pendidikan yang disamakan.

Pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah suatu jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan baik di sekolah negeri atau swasta yang ditandai dengan adanya tanda tamat belajar/ ijazah.

Angka Melek Huruf adalah persentase penduduk 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis baik huruf latin maupun huruf lainnya.

2.1.3 Perumahan dan Lingkungan

Luas lantai adalah luas lantai yang ditempati dan digunakan untuk keperluan sehari-hari. Bagian yang digunakan bukan untuk keperluan sehari-hari tidak dimasukkan dalam penghitungan luas lantai seperti lumbung padi, kandang ternak, jemuran, dan warung (sebatas atap).

Dinding adalah sisi luar batas dari suatu bangunan atau penyekat dengan rumahtangga atau bangunan lain.

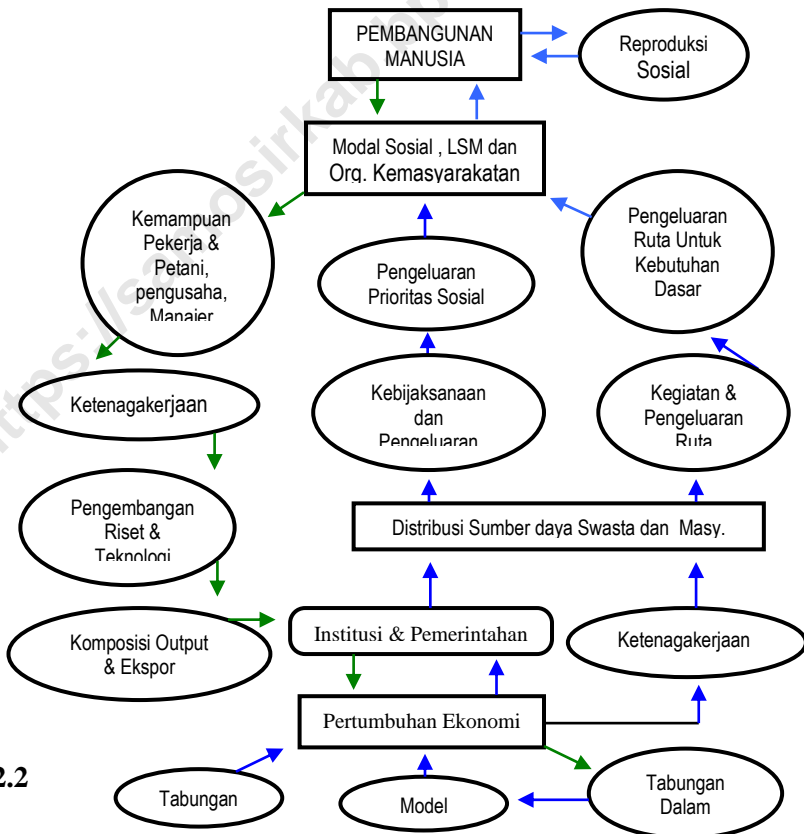
Atap adalah penutup bagian atau suatu bangunan sehingga orang yang mendiami di bawahnya terlindung dari teriknya matahari, hujan, dan sebagainya. Untuk bangunan bertingkat, atap yang dimaksud adalah bagian teratas dari bangunan tersebut.

2.1.4 Konsumsi/Pengeluaran

Rata-rata pengeluaran per kapita/bulan adalah rata-rata biaya yang dikeluarkan rumahtangga sebulan untuk konsumsi semua anggota rumahtangga dibagi dengan banyaknya anggota rumahtangga. Dalam konsep tersebut penduduk ditempatkan sebagai tujuan akhir (*the ultimate end*) sedangkan upaya pembangunan dipandang sebagai sarana (*principal means*) untuk mencapai tujuan itu.

Konsep pembangunan manusia mencakup teori pembangunan ekonomi yang konvensional termasuk model pertumbuhan ekonomi, pembangunan sumber daya manusia (SDM), pendekatan kesejahteraan dan pendekatan kebutuhan-kebutuhan dasar manusia. Pembangunan SDM menempatkan manusia terutama sebagai input dari proses produksi (sebagai suatu sarana bukan tujuan).

Gambar 2.1
Hubungan Antara Pembangunan Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi



2.2

2.2 KEDUDUKAN IPM DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pembangunan daerah merupakan realisasi dari tujuan suatu daerah yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan secara mendasar melalui upaya sistematis dan terencana. Proses perencanaan pembangunan Kabupaten Samosir meliputi pemantauan dan evaluasi terhadap berbagai program yang sedang dan akan berlangsung sebagai implementasi dari periode sebelumnya. Kondisi obyektif tentang permasalahan pokok yang dihadapi dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan daerah di Kabupaten Samosir bertujuan dalam pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang, tujuan jangka menengah dan tujuan jangka pendek.

Penempatan IPM sebagai salah satu ukuran dan patokan dasar dalam penentuan sasaran dan tujuan pembangunan daerah ditetapkan setelah berbagai kajian metodologis dan empirik yang dilakukan, serta ujicoba pemanfaatan IPM dalam perencanaan pembangunan daerah perlu dilakukan.

Kedudukan dan peranan Indeks Pembangunan Manusia dalam manajemen pembangunan akan lebih terlihat karena dilengkapi dengan suatu data set yang berisikan indikator yang relevan dengan IPM dan disusun sebagai suatu sistem *database* pembangunan manusia. Sistem *database* tersebut merupakan sumber data utama dalam identifikasi lebih lanjut yang dilakukan untuk mengenali permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan upaya, hasil serta dampak pembangunan manusia. Identifikasi tersebut dituangkan kedalam suatu analisis situasi pembangunan manusia yang mengkaji berbagai kendala dalam

implementasi program pembangunan pada periode sebelumnya dan potensi yang dimiliki suatu wilayah untuk dimasukkan sebagai masukan dalam perencanaan pembangunan daerah periode yang akan datang. Proses ini merupakan kajian yang dapat menghasilkan rekomendasi bagi implikasi kebijakan pembangunan yang paling sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, maka IPM merupakan alat advokasi kepada para pengambil keputusan dan perumus kebijakan tentang langkah-langkah pada masa mendatang yang perlu dilakukan.

Dalam konteks pembangunan daerah, IPM ditetapkan sebagai salah satu ukuran utama yang dicantumkan dalam manajemen pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP). Hal ini merupakan langkah penting yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Samosir karena Indeks Pembangunan Manusia menduduki salah satu posisi penting dalam manajemen pembangunan daerah. Pelaksanaan pembangunan secara luas juga meliputi unsur perencanaan, pemantauan dan evaluasi.

Bahkan di era otonomi daerah sekarang ini, Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sudah merupakan salah satu variabel di samping beberapa variabel lainnya, dalam pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) bagi seluruh propinsi dan kabupaten/kota sebagai salah satu sumber pendapatan daerah untuk pembangunan tidak terkecuali Kabupaten Samosir.

2.3 PEMANFAATAN IPM DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Konsep pembangunan manusia mempunyai cakupan yang sangat luas, melingkupi hampir seluruh aspek kehidupan manusia mulai dari kebebasan untuk menyatakan pendapat, untuk menyatakan kesetaraan gender, untuk memperoleh pekerjaan, untuk menjaga gizi anak, untuk dapat membaca dan menulis.

Tingkatan status pembangunan manusia yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antara 0 - 100 di Kabupaten Samosir berfungsi sebagai dasar perencanaan. Pada sektor perencanaan, pemanfaatan IPM terbatas hanya sebagai patokan dasar. Oleh karena itu perumusan kebijakan yang lebih terarah, suatu kajian tentang situasi pembangunan manusia perlu dilakukan disuatu wilayah untuk memberikan petunjuk yang lebih jelas tentang arah kebijakan pembangunan di masa yang akan datang.

Dalam merumuskan kebijakan pembangunan, perlu diperhatikan tingkat pencapaian setiap tahun. Karena itu kajian tentang pencapaian upaya pembangunan manusia perlu dilakukan dalam suatu periode tertentu, yang memberi kesempatan untuk mengkaji dampak dari program bagi peningkatan kapasitas dasar penduduk. Tingkat pencapaian setiap tahun menuju status pembangunan manusia yang ideal (*reduction in shortfall*) yang telah dihasilkan pada suatu periode merupakan validasi bagi kebijakan pembangunan yang telah diputuskan pada periode tersebut.

METODOLOGI

B A B 3

<https://samosirkab.bps.go.id/>

METODOLOGI PENGHITUNGAN IPM

3

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index (HDI)* merupakan suatu indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang dianggap sangat mendasar yaitu usia hidup (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent living*).

Secara umum metode penghitungan IPM yang disajikan dalam publikasi ini sesuai dengan metode yang digunakan *The United Nations Development Programme (UNDP)* dalam menghitung HDI. Berikut adalah penjelasan mengenai komponen yang diperlukan dalam prosedur penghitungan IPM. Penghitungan e_0 dilakukan dengan menggunakan *software Mortpak Lite*. Angka e_0 yang diperoleh dengan metode tidak langsung ini merujuk pada keadaan 3-4 tahun dari tahun suvei.

3.1 KOMPONEN-KOMPONEN IPM

3.1.1 Usia Harapan Hidup

Usia harapan hidup diukur dengan angka harapan hidup waktu lahir (*life expectancy at birth*) yang biasa dinotasikan dengan e^0 . Karena Indonesia tidak memiliki sistem vital registrasi yang baik, maka e^0 dihitung dengan metode tidak langsung. Metode ini menggunakan dua macam data dasar yaitu rata-rata anak yang dilahirkan hidup (*live-births*)

dan rata-rata anak masih hidup (*still living*) per wanita usia 15-49 tahun menurut kelompok umur lima tahunan. Penghitungan e^0 dilakukan dengan menggunakan software *Mortpak Lite*. Angka e^0 yang diperoleh dengan metode tidak langsung merujuk pada 3-4 tahun dari tahun survei.

3.1.2 Pengetahuan

Seperti halnya UNDP komponen IPM pengetahuan diukur dengan dua indikator yaitu angka melek huruf (*literacy rate*) penduduk 10 tahun keatas dan rata-rata lama sekolah (*mean-years of schooling*). Sebagai catatan, UNDP dalam publikasi tahunan HDI sejak 1995 mengganti rata-rata lama sekolah dengan partisipasi sekolah dasar, menengah, dan tinggi karena alasan kesulitan memperoleh datanya sekalipun diakui bahwa indikator yang kedua kurang sesuai sebagai indikator dampak.

Angka Melek Huruf (AMH) diolah dari variabel kemampuan membaca dan menulis, sedangkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dihitung menggunakan tiga variabel secara simultan yaitu partisipasi sekolah, tingkat/kelas yang sedang/pernah dijalani, dan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan.

3.1.3 Standar Hidup Layak

Berbeda dengan UNDP yang menggunakan indikator GDP per kapita riil yang telah disesuaikan (*adjusted real GDP per capita*) sebagai indikator standar hidup layak. Penulisan ini menggunakan indikator ‘rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan’ (*adjusted real per capita expenditure*) atau disebut juga daya beli (DB). Sumber data yang digunakan adalah Susenas dan survei lain yang mendukung.

3.2 TAHAPAN PENGHITUNGAN IPM

IPM merupakan rata-rata sederhana dari tiga komponen yaitu (1) lamanya hidup yang diukur dengan harapan hidup pada saat lahir; (2) tingkat pendidikan, yang diukur dengan kombinasi antara angka melek huruf pada penduduk dewasa (dengan bobot dua per tiga) dan rata-rata lama sekolah (dengan bobot sepertiga); dan (3) tingkat kehidupan yang layak, diukur dengan pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan (PPP Rupiah). Tahapan penghitungannya adalah sebagai berikut:

1. Penghitungan indeks masing-masing komponen IPM (e^0 , Pengetahuan, dan Standard Hidup Layak), secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Indek } (X_i) = (X_i - X_{\min}) / (X_{\max} - X_{\min})$$

dimana :

X_i = Indikator komponen Indeks Pembangunan Manusia ke-I
($i=1,2,3$)

X_{\min} = Nilai minimum X_i

X_{\max} = Nilai maksimum X_i

persamaan di atas akan menghasilkan nilai $0 \leq X_i \leq 1$, untuk mempermudah cara membaca, skala dinyatakan dalam 100 persen sehingga interval nilai menjadi $0 \leq X_i \leq 100$.

2. Penghitungan rata-rata sederhana dari masing-masing indeks X_i , secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} IPM &= 1/3 X_i \\ &= 1/3 [X(1) + X(2) + X(3)] \end{aligned}$$

dimana :

$X(1)$ = Indeks Angka Harapan Hidup (AHH)

$X(2)$ = $2/3$ (Indeks Melek Huruf) + $1/3$ (Indeks Rata-rata Lama Sekolah)

$X(3)$ = Indeks Konsumsi per kapita yang disesuaikan

Tabel 3.1
Nilai Maksimum dan Minimum Indikator Komponen IPM

No.	Komponen IPM	Nilai Maksimum	Nilai Minimum	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Angka Harapan Hidup (tahun)	85	25	Standard UNDP
2.	Angka Melek Huruf (%)	100	0	Standard UNDP
3.	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	15	0	Standard UNDP
4.	Konsumsi per kapita yang disesuaikan (000 Rp)	859,3	421,6	UNDP menggunakan PDB riil per kapita yang telah disesuaikan

3.3 PENENTUAN STATUS IPM

Untuk melihat perkembangan tingkatan status IPM di kabupaten/kota, dibedakan 4 (empat) kriteria dimana status menengah dipecah menjadi dua seperti dibawah ini :

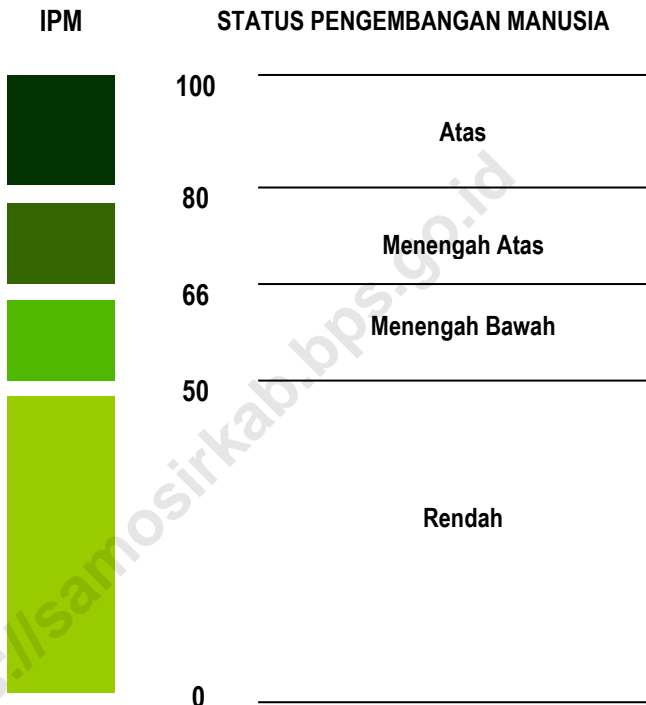
1. **Rendah** dengan nilai IPM kurang dari 50.
2. **Menengah Bawah** dengan nilai IPM berada diantara 50 sampai kurang dari 66.
3. **Menengah Atas** dengan nilai IPM berada antara 66 sampai kurang dari 80.
4. **Tinggi** dengan nilai IPM lebih atau sama dengan 80.

Jika status pembangunan manusia masih berada pada kriteria rendah hal ini berarti kinerja pembangunan manusia daerah tersebut masih memerlukan perhatian khusus untuk mengejar ketinggalannya. Begitu juga jika status pembangunan manusia masih berada pada kriteria menengah hal ini berarti pembangunan manusia masih perlu ditingkatkan.

Jika daerah tersebut mempunyai status pembangunan manusia tinggi hal ini berarti kinerja pembangunan manusia daerah tersebut sudah baik/optimal maka perlu dipertahankan supaya kualitas sumber daya manusia tersebut lebih produktif sehingga memiliki produktivitas yang tinggi.

Sedangkan pembagian tentang status Indeks Pembangunan Manusia (IPM) lebih terperinci dijelaskan seperti dalam gambar sebagai berikut :

Gambar 3.1
STATUS INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA



ANALISIS KOMPONEN IPM

B A B 4

<https://samosirku.com>

GAMBARAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR



4.1 LETAK DAN GEOGRAFIS

Berdasarkan Undang Undang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 36 Tahun 2003 yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 18 Desember 2003, menetapkan terbentuknya Kabupaten Samosir sebagai kabupaten pemekaran dari Kabupaten Tobasa, yang terbagi dalam 9 (sembilan) wilayah kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Simanindo,
2. Kecamatan Onan Runggu,
3. Kecamatan Nainggolan,
4. Kecamatan Palipi,
5. Kecamatan Sitio-tio,
6. Kecamatan Harian,
7. Kecamatan Sianjur Mulamula,
8. Kecamatan Ronggur Nihuta, dan
9. Kecamatan Pangururan.

Secara geografis, Kabupaten Samosir terletak pada posisi antara 2^o21'38'' dan 2^o49'48'' Lintang Utara, dan antara 98^o24'00'' dan 99^o01'48'' Bujur Timur, dengan ketinggian antara 904 meter dan 2.157 meter di atas permukaan laut.

Kabupaten Samosir merupakan daerah pulau yaitu seluruh Pulau Samosir yang dikelilingi oleh Danau Toba ditambah sebagian wilayah daratan Pulau Sumatera. Luas wilayahnya mencapai 2.069,05 km², terdiri dari luas daratan 1.444,25 km² dengan topografi dan kontur tanah yang beraneka ragam, yaitu datar, landai, miring dan terjal, dan luas danau 624,80 km². Struktur tanahnya labil dan berada pada jalur gempa tektonik dan vulkanik.

Sebagai Kabupaten yang dikelilingi oleh beberapa kabupaten, maka batas-batas dari Kabupaten Samosir adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Danau Toba,

Sebelah Timur : berbatasan dengan Danau Toba,

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Danau Toba dan Kabupaten Humbang Hasundutan, dan

Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Dairi

Pembagian luas daratan menurut kecamatan antara lain: Kecamatan Harian 560,45 km² (38,81 persen), Simanindo 198,20 km² (13,72 persen), Sianjur Mulamula 140,24 km² (9,71 persen), Palipi 129,55 km² (8,97 persen), Ronggur Nihuta 94,87 km² (6,57 persen), Pangururan 121,43 km² (8,41 persen), Nainggolan 87,86 km² (6,08 persen), Onan Runggu 60,89 km² (4,22 persen), dan Siotio 50,76 km² (3,51 persen).

4.2 KEPENDUDUKAN

Dalam pelaksanaan pembangunan, penduduk merupakan faktor yang sangat dominan karena penduduk tidak saja sebagai pelaksana tetapi juga menjadi sasaran dari pembangunan. Oleh sebab itu untuk menunjang

keberhasilan pembangunan perkembangan penduduk perlu diarahkan sehingga mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang menguntungkan pembangunan.

Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera menyebutkan bahwa perkembangan kependudukan diarahkan pada pengendalian kuantitas, perkembangan kualitas, serta pengarahan mobilitas penduduk, sebagai potensi sumber daya manusia agar menjadi kekuatan pembangunan. Lebih lanjut pasal 4 ayat (1) menyebutkan tujuan dari perkembangan kependudukan, yaitu untuk mewujudkan keserasian, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas, persebaran penduduk dengan lingkungan hidup.

Untuk mewujudkan perkembangan penduduk sebagaimana ditetapkan oleh UU No.10 Tahun 1992 tersebut perlu ditetapkan kebijaksanaan dalam hal kuantitas penduduk yang berhubungan dengan penetapan jumlah, struktur dan komposisi, pertumbuhan dan persebaran yang ideal, sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

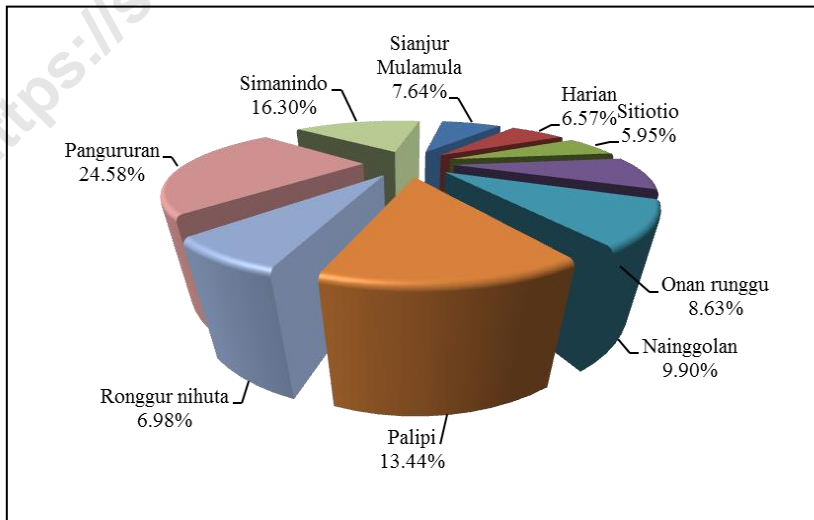
4.2.1 Jumlah dan Persebaran Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Samosir tahun 2013 adalah 121.924 jiwa yang tersebar di 9 (sembilan) kecamatan. Berdasarkan kecamatan, wilayah Kabupaten Samosir dengan jumlah penduduk yang terbanyak berada di Kecamatan Pangururan yaitu sebanyak 29.970 jiwa atau 24,58 persen dari jumlah seluruh penduduk Kabupaten Samosir dengan tingkat

kepadatan/density level 246,81 jiwa/km². Sedangkan wilayah kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit terdapat di Kecamatan Silitio yaitu sebanyak 7.260 jiwa atau 5,95 persen dari jumlah seluruh penduduk Kabupaten Samosir dengan tingkat kepadatan 143,03 jiwa/km².

Kecamatan yang mempunyai angka kepadatan penduduk paling kecil adalah Kecamatan Harian, walaupun merupakan kecamatan yang paling luas wilayahnya, yaitu mencapai 560,45 km², namun hanya didiami oleh penduduk sebanyak 8.010 jiwa (6,57 persen) dengan dengan tingkat kepadatan 14,29 jiwa/km². Hal ini disebabkan karena sebagian besar wilayahnya merupakan areal hutan produksi maupun hutan lindung dan juga areal pertanian.

Gambar 4.1
Distribusi Persentase Penduduk Kabupaten Samosir Tahun 2013



Sumber: Angka Proyeksi Penduduk Pertengahan Tahun 2013, BPS Prov. Sumut

4.2.2 Komposisi Umur

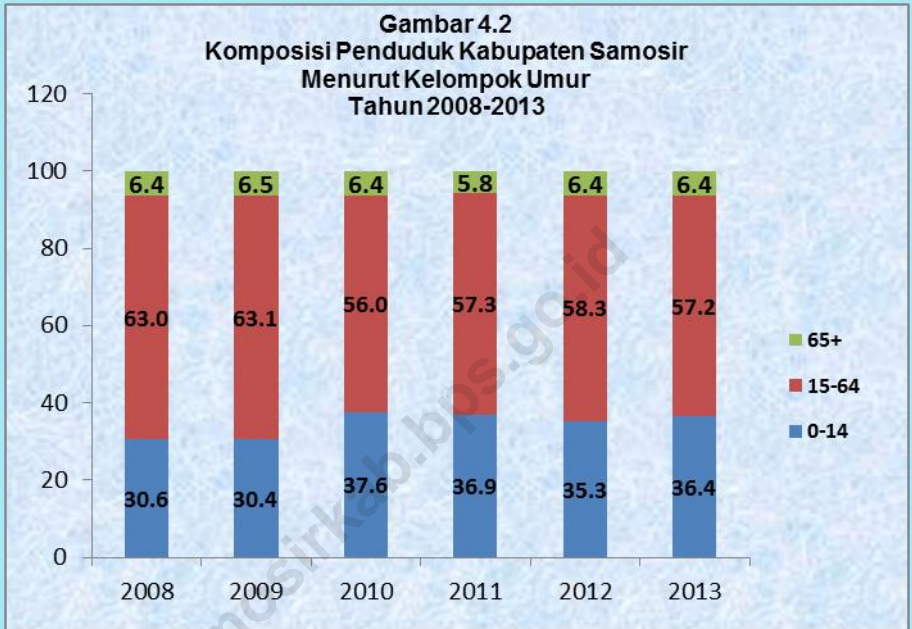
Komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin merupakan variabel penting dalam demografi. Hampir semua pembahasan mengenai masalah kependudukan melibatkan variabel umur dan jenis kelamin penduduk. Struktur umur penduduk antar daerah yang satu dengan daerah lain tidak sama. Struktur umur penduduk dipengaruhi oleh tiga variabel demografi yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Faktor-faktor sosial ekonomi di suatu daerah akan mempengaruhi struktur umur penduduk berdasarkan ketiga variabel diatas.

Struktur umur penduduk akan terlihat lebih sederhana untuk dianalisis jika dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar, yaitu 0-14 tahun, 15-64 tahun, dan 65 tahun ke atas seperti berikut ini.

Tabel 4.1
Banyaknya Penduduk di Kabupaten Samsir
Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin, dan Rasio Jenis Kelamin
Tahun 2013

Kelompok Umur (Tahun)	Jenis Kelamin		Laki-laki + Perempuan	Rasio Jenis Kelamin
	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0 - 14	22 823	21 559	44 382	105,01
15 - 64	34 820	34 961	69 781	99,71
65 +	2 935	4 816	7 751	62,84
Jumlah	60 578	61 336	121 914	98,65

Sumber : BPS Propinsi Sumatera Utara, Angka Proyeksi Penduduk Pertengahan Tahun 2013



Sumber : BPS Propinsi Sumatera Utara, Angka Proyeksi Penduduk Pertengahan Tahun 2013

Suatu wilayah dikatakan mempunyai struktur umur muda jika proporsi penduduk usia dibawah 15 tahun (0-14) tahun lebih atau sama dengan 40 persen dan kelompok penduduk berusia 15-64 tahun kurang atau sama dengan 55 persen, sementara proporsi kelompok umur usia 65 tahun ke atas kurang atau sama dengan 5 persen. Sebaliknya suatu struktur umur penduduk dikatakan tua jika proporsi penduduk usia 0-14 tahun kurang dari atau sama dengan 30 persen dan kelompok penduduk berusia 15-64 tahun lebih besar atau sama dengan 60 persen, sementara proporsi kelompok usia 65 persen lebih atau sama dengan 10 persen. Berdasarkan umur median suatu negara atau daerah termasuk penduduk muda apabila memiliki umur median penduduk kurang atau sama dengan 20 tahun,

intermediate apabila umur mediannya 10-30 tahun dan penduduk tua apabila umur mediannya lebih besar atau sama dengan 30 tahun.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa struktur umur Kabupaten Samosir dapat dikategorikan kelompok penduduk *intermediate* yang tidak tergolong tua dan juga tidak muda, dimana proporsi penduduk umur 0-14 tahun pada tahun 2013 sebesar 36,4 persen dan komposisi umur 15-64 tahun sebesar 57,2 persen. Sementara proporsi penduduk usia 65 tahun ke atas yaitu hanya sebesar 6,4 persen. Hal tersebut diduga akibat masih tingginya kelahiran dan migrasi keluar penduduk usia produktif di Kabupaten Samosir. Maka diharapkan kebijakan pemerintah harus lebih banyak dititikberatkan kepada pemenuhan kebutuhan penduduk terutama di bidang pendidikan dan penyediaan lapangan kerja.

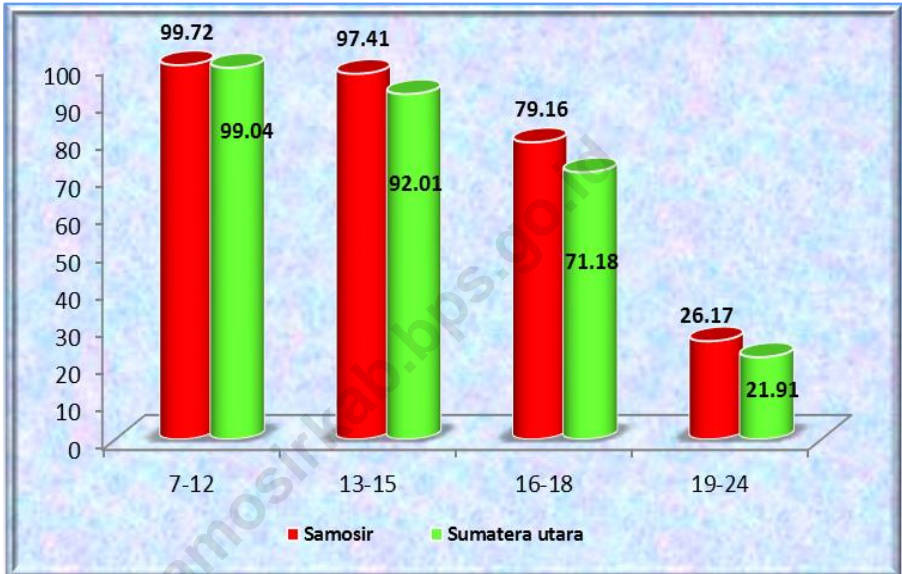
4.3 TINGKAT PENDIDIKAN

Salah satu amanat yang diemban pemerintah menurut UUD 1945 adalah upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejauh mana amanat ini dilaksanakan tercermin antara lain dari profil pendidikan penduduk yang akan dibahas secara singkat dalam uraian berikut ini, yang akan menyajikan gambaran umum mengenai kemampuan baca tulis penduduk, tingkat pendidikan (formal) yang dicapai, status pendidikan, dan kemampuan berbahasa Indonesia.

4.3.1 Angka Partisipasi Sekolah

Gambar 4.3 menyajikan perbandingan partisipasi sekolah penduduk menurut kelompok umur antara Kabupaten Samosir dan Propinsi Sumatera Utara secara keseluruhan.

Gambar 4.3
Persentase Penduduk Kabupaten Samosir dan Sumatera Utara
Yang Masih Sekolah menurut Kelompok Umur, 2013



Sumber : Susenas 2013, BPS Kabupaten Samosir

Bila diamati menurut kelompok umur, partisipasi sekolah usia 7-12 tahun di Kabupaten Samosir tahun 2013 adalah sebesar 99,72 persen atau masih terdapat sekitar 0,28 persen penduduk usia 7-12 tahun yang belum menikmati fasilitas pendidikan SD. Sementara partisipasi sekolah usia 7-12 tahun untuk Provinsi Sumatera Utara tahun 2013 sebesar 99,04 persen. Sedangkan angka partisipasi sekolah usia 13-15 Kabupaten Samosir adalah sebesar 97,41 persen, atau masih terdapat sekitar 2,59 persen penduduk usia 13-15 tahun yang belum menikmati fasilitas pendidikan SMTP. Sedangkan partisipasi sekolah kelompok usia 13-15 tahun Provinsi Sumatera Utara adalah sebesar 92,01 persen.

Partisipasi sekolah untuk kelompok umur 16-18 tahun Samosir selama tahun 2013 adalah sebesar 79,16 persen yang berarti bahwa sekitar 20,84 persen penduduk usia 16-18 tahun belum menikmati fasilitas pendidikan SMTA. Sedangkan partisipasi sekolah kelompok usia 16-18 tahun Provinsi Sumatera Utara adalah sebesar 71,18 persen. Hal ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Samosir selama tahun 2013, tingkat partisipasi sekolah usia SD (7-12 tahun) masih lebih besar dibanding partisipasi sekolah usia SMTP (13-15 tahun), usia SMTA (16-18 tahun), serta usia Diploma/Sarjana (19-24 tahun). Hal ini berarti masih minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Secara umum, kemampuan ekonomi masyarakat Kabupaten Samosir juga masih tergolong menengah ke bawah menyebabkan kurangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pendidikan sampai jenjang perguruan tinggi. Di samping itu juga keterbatasan ketersediaan fasilitas pendidikan jenjang pendidikan tinggi yaitu Diploma/Sarjana di Kabupaten Samosir sebagai faktor penyebab yang dapat memungkinkan rendahnya partisipasi sekolah di Kabupaten Samosir untuk pendidikan tinggi.

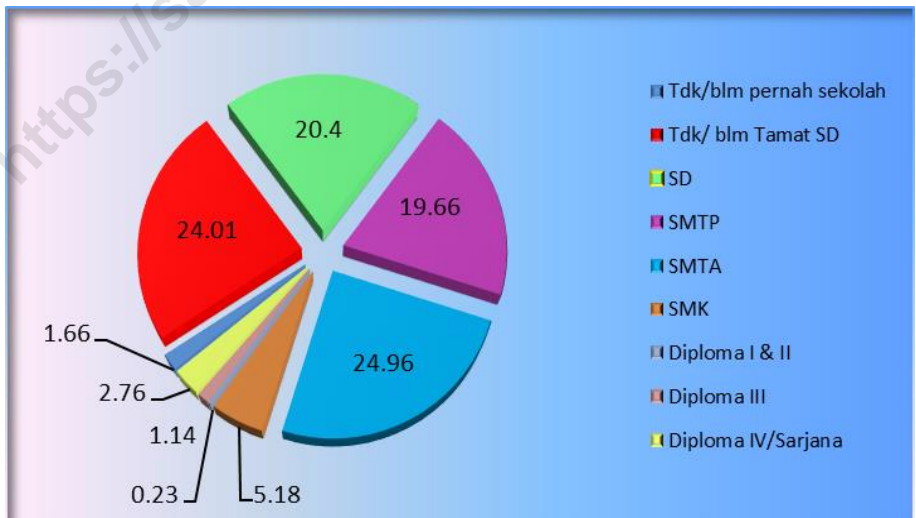
4.3.2 Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan

Sebagaimana halnya dengan dengan angka partisipasi sekolah, tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan penduduk 10 tahun ke atas juga merupakan salah satu indikator untuk mengukur hasil pembangunan di bidang pendidikan.

Gambar 4.4 menunjukkan bahwa pada tahun 2013 di Kabupaten Samsir masih terdapat 1,66 persen penduduk berumur 10 tahun ke atas yang “seharusnya” pernah sekolah tetapi pada kenyataannya tidak/belum pernah sekolah, ini mengalami peningkatan bila dibandingkan angka tidak/belum pernah sekolah pada tahun 2012 yaitu sebanyak 1,21 persen.

Modus tingkat pendidikan tertinggi di Kabupaten Samsir selama tahun 2013 adalah tamat SMTA Umum sebanyak 24,96 persen, tamat SD sebanyak 20,40 persen, tamat SMTP sebanyak 19,66 persen, disusul kemudian dengan tamat SMK sebesar 5,18 persen. Sedangkan persentase penduduk 10 tahun ke atas yang tamat Universitas hanya sebanyak 4,13 persen pada tahun 2013.

Gambar 4.4
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan
Penduduk Kabupaten Samsir Usia 10 tahun ke atas, Tahun 2013



Sumber : Susenas 2013, BPS Kabupaten Samsir

4.4 TINGKAT KESEHATAN

4.4.1 Penyediaan Sarana Kesehatan

Kesehatan harus dipandang sebagai investasi di masa mendatang dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pembangunan di bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Faktor-faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat diantaranya adalah kurangnya sarana pelayanan kesehatan, keadaan sanitasi dan lingkungan yang tidak memadai, dan rendahnya konsumsi makanan bergizi. Tetapi faktor terpenting dalam upaya peningkatan kesehatan ada pada manusia sebagai subyek dan sekaligus obyek dari upaya tersebut.

Tabel 4.2
Jumlah Sarana Kesehatan di Kabupaten Samosir,
Menurut Kecamatan Tahun 2013

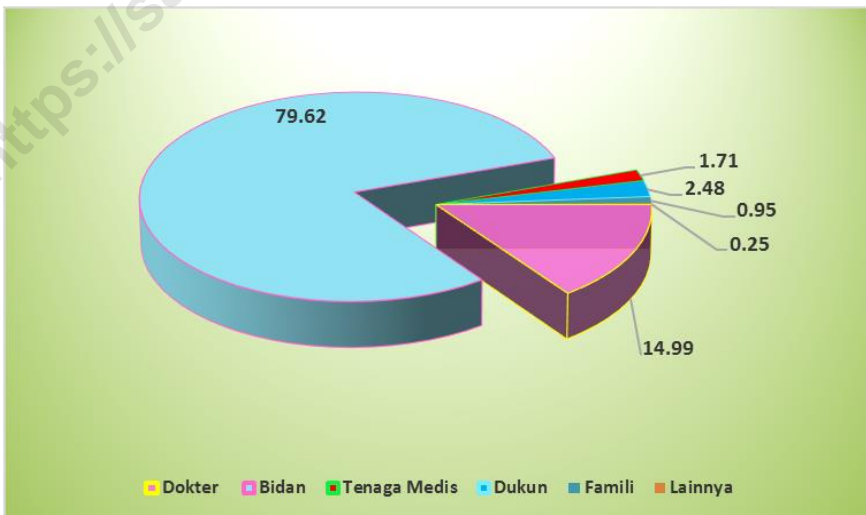
KECAMATAN	Rumah Sakit	Puskesmas	Pustu	Pos yandu	Klinik Ber salin	Pos Kesdes	Polin des
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Sianjur Mulamula	-	1	3	19	-	9	3
2. Harian	-	1	4	16	-	6	2
3. Sitiotio	-	1	3	12	-	4	1
4. Onan Runggu	-	1	3	16	-	6	-
5. Nainggolan	1	1	3	17	-	5	6
6. Palipi	-	1	3	29	-	10	3
7. Ronggur Nihuta	-	1	6	13	-	1	2
8. Pangururan	1	1	5	47	3	8	3
9. Simanindo	-	4	4	39	-	12	1
SAMOSIR	2	12	34	208	3	61	21

Sumber : BPS Kabupaten Samosir, 2013

4.4.2 Tenaga Kesehatan Penolong Kelahiran

Kesehatan balita selain dipengaruhi oleh kesehatan ibu, dapat juga dipengaruhi oleh faktor lain, diantaranya adalah penolong kelahiran. Data komposisi penolong kelahiran bayi dapat dijadikan sebagai salah satu indikator kesehatan dalam hubungannya dengan tingkat kesehatan ibu dan anak serta pelayanan kesehatan secara umum. Dilihat dari kesehatan ibu dan anak, persalinan yang ditolong oleh tenaga medis seperti dokter dan bidan dapat dianggap lebih baik dibanding dengan yang ditolong oleh dukun, famili atau lainnya. Penanganan kelahiran bayi yang kurang baik dapat membahayakan kondisi ibu dan bayi yang dilahirkan seperti pendarahan, kejang-kejang atau situasi yang lebih berbahaya dapat mengakibatkan kematian pada bayi atau si ibu.

Gambar 4.5
Persentase Balita Menurut Penolong Kelahiran Pertama, 2013



Sumber : Susenas 2013, BPS Provinsi Sumatera Utara

4.5 PEREKONOMIAN

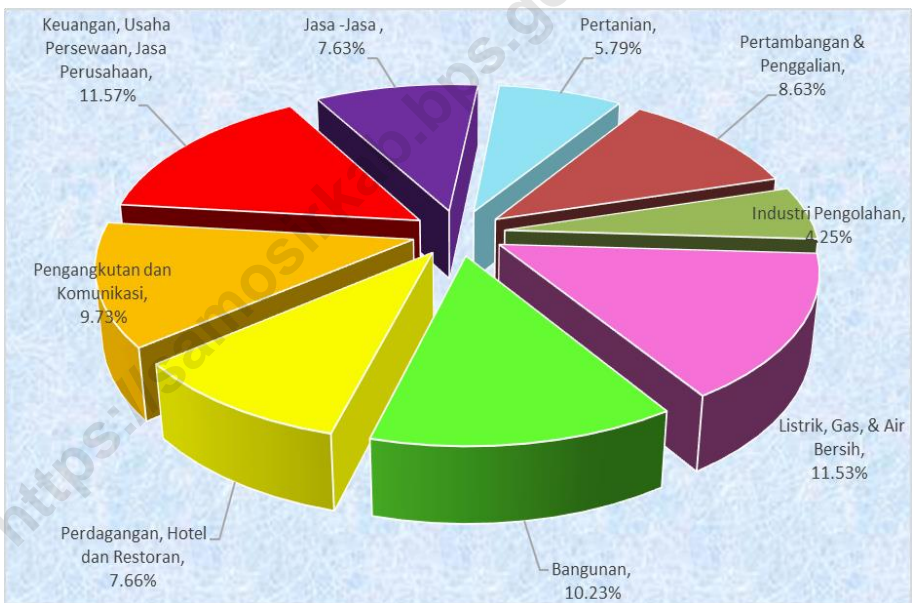
Pencapaian terhadap pembangunan khususnya untuk sektor ekonomi dapat diukur dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan tersebut merupakan rangkuman laju pertumbuhan dari berbagai sektor ekonomi yang menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi. Pertumbuhan ekonomi secara umum dapat dipengaruhi oleh sembilan sektor usaha, antara lain: Sektor Pertanian; Sektor Pertambangan dan Penggalian; Sektor Industri Pengolahan; Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih; Sektor Bangunan; Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran; Sektor Pengangkutan dan Komunikasi; Sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan, serta Sektor Jasa-Jasa.

Pembentukan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Samosir tahun 2013 masih didominasi oleh sektor pertanian dengan nilai mencapai Rp. 1.298,43 milyar (57,95 persen), yang diikuti oleh sektor jasa-jasa Rp. 574,07 milyar (25,62 persen), dan sektor perdagangan, hotel dan restoran Rp. 221,46 milyar (9,88 persen). Ketiga sektor tersebut memberikan total peranan yang keseluruhan yaitu sebesar 93,45 persen terhadap pembentukan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Samosir. Peranan ini sedikit mengalami penurunan bila dibandingkan tahun 2012 dimana total peranan ketiga sektor untuk tahun 2012 mencapai 93,71 persen. Gambaran ini menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Samosir masih sangat tergantung pada ketiga sektor tersebut.

Peranan sektor yang lain yaitu sektor Keuangan, persewaan & Jasa Perusahaan sebesar 2,52 persen, sektor Industri Pengolahan sebesar 1,75

persen, sektor Pengangkutan & Komunikasi sebesar 1,59 persen, sektor Bangunan sebesar 0,44 persen, sektor Listrik, Gas & Air Bersih sebesar 0,18 persen, dan peranan sektor yang paling kecil adalah sektor Pertambangan & Penggalian yaitu sebesar 0,07 persen.

Gambar 4.6
Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Samsir
Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2013



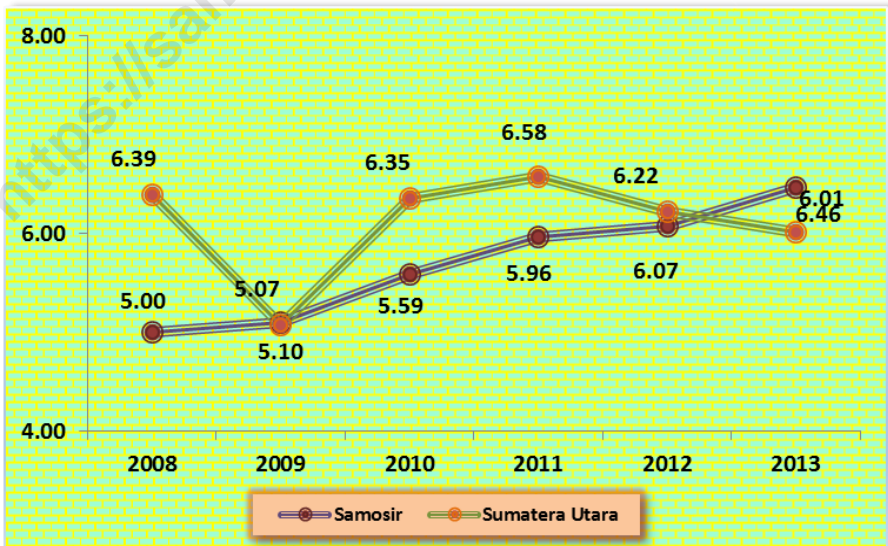
Sumber: BPS Kabupaten Samsir, 2013

Selama tahun 2013 seluruh sektor mengalami laju pertumbuhan yang positif, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan, bahkan terdapat 7 sektor yang mengalami laju pertumbuhan atas dasar harga konstan yang lebih tinggi dari laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Samsir maupun laju pertumbuhan masing-masing sektor pada tahun 2012.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Samsir tahun 2013 diukur berdasarkan kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 2000 sebesar 6,46 persen dan mengalami peningkatan bila dibandingkan tahun 2012 yaitu sebesar 6,07 persen. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan dimana laju masing-masing adalah sebesar 11,57 persen, disusul sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih, sektor bangunan sebesar 10,23 persen, sektor Pengangkutan dan Komunikasi sebesar 9,73 persen, sektor Pertambangan dan Penggalian 8,63 persen, sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran 7,66 persen, sektor Jasa-Jasa sebesar 7,63 persen, sektor Pertanian 5,79 persen, dan sektor Industri Pengolahan sebesar 4,25 persen.

Gambar 4.7

**Perkembangan Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Samsir
ADH Konstan 2000, Tahun 2008 - 2013**

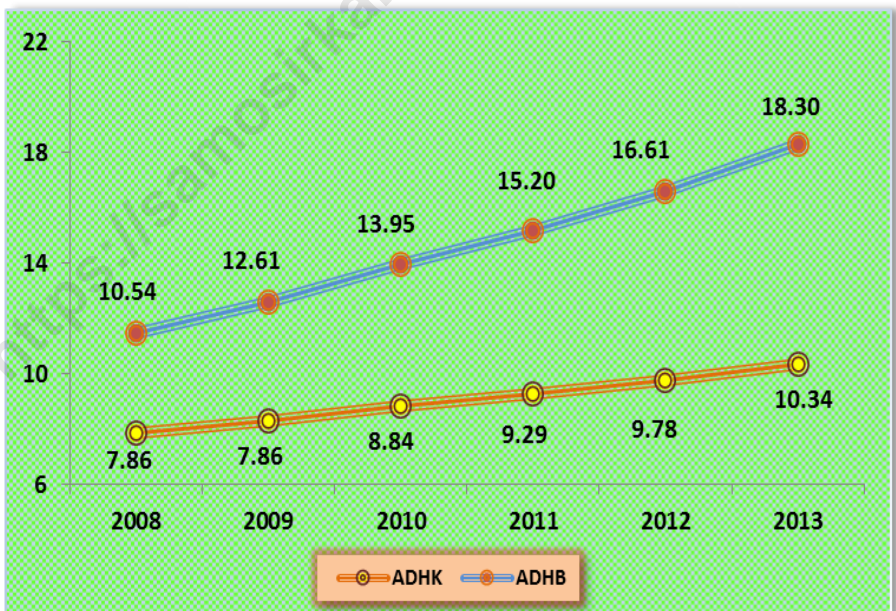


Sumber: BPS Kabupaten Samsir, 2013

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita Kabupaten Samsir Atas Dasar Harga Berlaku tahun 2013 sebesar Rp. 18,30 juta mengalami peningkatan dari tahun 2012 dimana PDRB per Kapita nya adalah sebesar Rp. 16,61 juta dan pada tahun 2011 sebesar Rp. 15,20 juta. Perkembangan struktur perekonomian Kabupaten Samsir dilihat dari PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2000 sejak tahun 2008-2013, dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 4.8

**Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Samsir
Tahun 2008-2013**



Sumber: BPS Kabupaten Samsir, 2013

ANALISIS SITUASI PEMBANGUNAN MANUSIA (ASPM)

**B
A
B**

5

ANALISIS SITUASI PEMBANGUNAN MANUSIA

5

5.1 KOMPONEN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

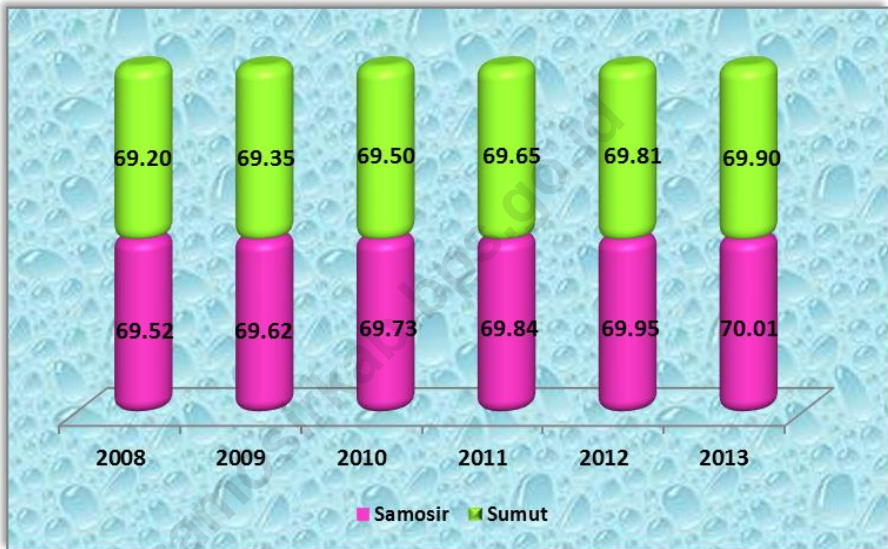
5.1.1 Indeks Harapan Hidup Kabupaten Samosir

Angka Harapan Hidup merupakan salah satu indikator *output* pembangunan di bidang kesehatan dalam upaya menciptakan sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas. Angka Harapan Hidup bahkan sering dikaitkan dengan tingkat kemajuan suatu negara/daerah, karena pada umumnya negara yang kurang maju bahkan miskin dan terbelakang menunjukkan angka harapan hidup rendah atau bahkan sebaliknya negara/daerah yang sudah maju menunjukkan angka harapan hidup yang tinggi, yang berarti pula secara rata-rata sumber daya manusia di suatu negara/daerah yang maju lebih sehat dan berkualitas dibandingkan dengan negara/daerah yang terbelakang bahkan miskin. Oleh karena itu pembangunan di segala bidang khususnya bidang kesehatan dalam hal peningkatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, dan mempersiapkan generasi yang sehat dan berkualitas, mutlak harus dilakukan. Pemerataan pelayanan kesehatan yang berkualitas sangat diperlukan demi tercapainya masyarakat yang sehat tak terkecuali di Kabupaten Samosir.

Kualitas sumber daya manusia secara keseluruhan dapat dipandang dari aspek fisik dan non fisik yang tentunya keduanya saling berkaitan. Kualitas fisik penduduk dapat dilihat dari derajat kesehatan penduduk. Salah satu indikator utama dalam mengukur derajat kesehatan penduduk secara makro adalah angka harapan hidup waktu lahir. Angka Harapan Hidup ini memperlihatkan keadaan dan sistem pelayanan kesehatan yang ada di masyarakat, karena dapat dipandang sebagai suatu bentuk akhir dari hasil upaya peningkatan taraf kesehatan secara makro. Kebijakan peningkatan kesehatan antara lain bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membiasakan diri untuk hidup sehat, diharapkan dapat meningkatkan angka harapan hidup penduduk. Semakin tinggi angka harapan hidup menunjukkan bahwa derajat kesehatan masyarakat secara makro semakin tinggi.

Angka Harapan Hidup di Kabupaten Samosir dari tahun ke tahun diharapkan semakin meningkat. Angka harapan hidup penduduk Kabupaten Samosir tahun 2013 sebesar 70,01 tahun, sedikit meningkat dibanding pada tahun 2012 yaitu sebesar 69,95 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesehatan di Kabupaten Samosir juga mengalami peningkatan meskipun tidak signifikan. Secara umum dapat dikatakan bahwa kondisi kesehatan makro di Kabupaten Samosir membaik. Hal ini digambarkan melalui angka harapan hidup Kabupaten Samosir lebih tinggi dibanding angka harapan hidup Sumatera Utara tahun 2013 tercatat 69,90 yang berarti bahwa rata-rata usia harapan hidup penduduk di Kabupaten Samosir mendekati 70 tahun.

Gambar 5.1
Angka Harapan Hidup Kabupaten Samsir
dan Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2008 – 2013



Sumber : BPS Propinsi Sumatera Utara, 2013

5.1.2 Indeks Pengetahuan Kabupaten Samsir

Peningkatan kualitas SDM ditentukan oleh kualitas dan sistem pendidikan yang diterima. Pendidikan mempunyai peranan penting bagi bangsa dan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia. Pentingnya pendidikan tercermin dalam UUD 1945 dan GBHN, yang mengatakan bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian program pendidikan mempunyai andil besar terhadap kemajuan bangsa, baik di bidang ekonomi maupun sosial.

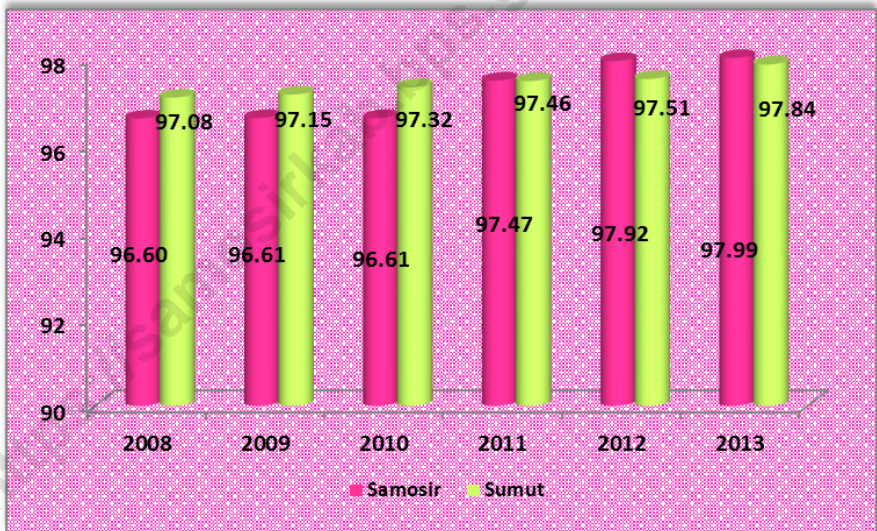
Keseriusan pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan terlihat melalui pelaksanaan program wajib belajar 6 tahun yang telah dimulai sejak tahun 1984. Sejak tahun 1994 program wajib belajar yang dilaksanakan menjadi wajib belajar 9 tahun. Hal serupa juga dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Samosir, tidak hanya turut serta mensukseskan program wajib belajar 9 tahun, tetapi juga turut mendukung program pemerintah lainnya di bidang pendidikan, diantaranya menggratiskan biaya pendidikan dasar. Dengan demikian diharapkan tingkat pendidikan penduduknya akan lebih baik dan jumlah penduduk yang buta huruf akan berkurang terutama pada penduduk usia sekolah (7-24 tahun). Secara umum keadaan pendidikan digambarkan oleh beberapa indikator antara lain: angka partisipasi sekolah, tingkat pendidikan yang ditamatkan dan angka melek huruf.

5.1.2.1 Angka Melek Huruf

Ukuran yang sangat mendasar dari indikator pendidikan, secara makro adalah kemampuan baca tulis (melek huruf) penduduk berusia 10 tahun ke atas, yaitu kemampuan untuk membaca dan menulis huruf latin dan lainnya. Pada tahun 2013 angka melek huruf di Kabupaten Samosir adalah 97,99 persen, lebih rendah jika dibandingkan dengan daerah kabupaten/kota sekitarnya seperti Kabupaten Karo 99,08 persen, Tapanuli Utara sebesar 98,68 persen, Toba Samosir sebesar 98,57 persen, Humbang Hasundutan sebesar 98,23 persen, dan Dairi 98,76 persen, kecuali Kabupaten Pakpak Barat masih berada dibawah Kabupaten Samosir yaitu

97,52 persen dan Simalungun sebesar 97,62 persen. Angka Melek Huruf Kabupaten Samsir tahun 2013 berada diatas angka melek huruf Propinsi Sumatera Utara yaitu 97,84 persen dan mengalami peningkatan dibanding dengan tahun 2012 yaitu 97,51 persen.

Gambar 5.2
Perbandingan Angka Melek Huruf Penduduk Usia 10 tahun keatas
Kabupaten Samsir dan Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2008 – 2013



Sumber : Susenas 2013, BPS Kabupaten Samsir

5.1.2.2 Angka Buta Huruf

Indikator pendidikan lainnya yang merupakan kebalikan dari melek huruf adalah buta huruf. Buta huruf untuk penduduk berusia 10 tahun ke atas berarti ketidakmampuan untuk membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya. Tabel 5.1 memberikan gambaran tentang angka

buta huruf di Kabupaten Samsir khususnya dan Provinsi Sumatera Utara umumnya selama empat tahun terakhir.

Tabel 5.1
Angka Buta Huruf Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas
Kabupaten Samsir dan Propinsi Sumatera Utara
Tahun 2008-2013

Wilayah	2008	2009	2010	2011	2012	2013
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
Samsir	3,24	2,95	3,15	2,16	2,08	1,61
Sumatera Utara	2,64	2,49	2,40	2,85	2,49	1,91

Sumber : Susenas 2013, BPS Propinsi Sumatera Utara

Angka buta huruf Kabupaten Samsir pada tahun 2013 sebesar 1,61 persen. Angka ini menurun bila dibandingkan angka buta huruf pada tahun 2012 yaitu sebesar 2,08 persen. Angka buta huruf Kabupaten Samsir tahun 2013 masih lebih rendah bila dibandingkan dengan angka buta huruf Provinsi Sumatera Utara yaitu sebesar 1,91 persen. Hal ini menggambarkan peranan pemerintah dalam rangka mencerdaskan masyarakat Samsir semakin maksimal, ditunjukkan dengan menurunnya angka buta huruf dan semakin meningkatnya angka melek huruf.

5.1.2.3 Rata-rata Lama Sekolah

Ukuran lain dari tingkat pendidikan yang menjadi indikator dari IPM adalah rata-rata lama sekolah. Secara umum indikator ini

menunjukkan jenjang pendidikan yang telah dicapai oleh penduduk 10 tahun ke atas. Pada tahun 2013, rata-rata lama sekolah penduduk 10 tahun ke atas di Kabupaten Samosir sebesar 9,57 tahun, berarti secara umum penduduk di Kabupaten Samosir sudah menyelesaikan tingkat pendidikan sampai jenjang SLTP bahkan sudah duduk di kelas I (satu) SLTA dan sudah mencapai target Program Pendidikan Sembilan Tahun. Kondisi ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata lama sekolah Provinsi Sumatera Utara secara umum yang tercatat sebesar 9,13 tahun. Angka tersebut tidak jauh berbeda jika dibandingkan dengan tahun 2012, dimana rata-rata lama sekolah Kabupaten Samosir sebesar 9,55 tahun dan angka Sumatera Utara masih di bawah Kabupaten Samosir, yaitu 9,07 tahun.

Gambar 5.3
Persentase Penduduk usia 10 tahun ke atas menurut
Ijazah tertinggi yang dimiliki/ Pendidikan yang ditamatkan
Tahun 2013



Sumber : Susenas 2013, BPS Kabupaten Samosir

Gambar 5.3 menunjukkan bahwa pada tahun 2013, penduduk Kabupaten Samosir yang tamat pendidikan Sekolah Dasar (SD) sebesar 20,40 persen, tamat pendidikan Sekolah Menengah (SMTP/SMTA Umum/SMTA Kejuruan) sekitar 49,80 persen, tamat pendidikan tinggi (Perguruan Tinggi) sebesar 4,12 persen, tidak/belum pernah sekolah 1,66 persen dan tidak/ belum tamat SD sebesar 24,01 persen.

Kepedulian penduduk Kabupaten Samosir terhadap pendidikan dapat dilihat dengan lebih spesifik dari rata-rata lama sekolah menurut jenis kelamin. Penduduk laki-laki usia 10 tahun ke atas yang menamatkan jenjang pendidikan dasar (SD) sebesar 19,60 persen, lebih rendah dari penduduk perempuan usia 10 tahun ke atas yang menamatkan jenjang pendidikan dasar (SD), yaitu sebesar 21,17 persen. Demikian juga dengan penduduk laki-laki usia 10 tahun ke atas yang menamatkan pendidikan menengah (SMTP/SMTA Umum/SMTA Kejuruan) sebesar 54,93 persen masih lebih banyak jika dibandingkan dengan penduduk perempuan usia 10 tahun ke atas yang menamatkan pendidikan menengah (SMTP/SMTA Umum/ SMTA Kejuruan) yaitu sebesar 44,81 persen. Sementara itu penduduk laki-laki yang menamatkan sampai jenjang pendidikan tinggi (Perguruan Tinggi) sebesar 3,75 persen. Angka tersebut lebih rendah bila dibandingkan dengan penduduk perempuan usia 10 tahun ke atas yang menamatkan sampai jenjang pendidikan tinggi (Perguruan Tinggi) yaitu sebesar 4,48 persen. Berdasarkan rata-rata lama sekolah penduduk usia 10 tahun ke atas, dapat digambarkan bahwa secara rata-rata baik penduduk laki-laki maupun perempuan yang paling banyak telah menamatkan

jenjang pendidikan sampai pendidikan menengah (SMTP/SMTA Umum/SMTA Kejuruan), kemudian diikuti pendidikan dasar dan paling sedikit adalah jenjang pendidikan tinggi.

Salah satu komponen penyusun angka IPM yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya adalah Tingkat Pengetahuan. Tingkat Pengetahuan terdiri dari angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Dari hasil penghitungan secara nasional, bahwa angka melek huruf tahun 2013 di Kabupaten Samosir tercatat sebesar 97,99 persen yang berarti masih kurang sekitar 2,01 persen untuk mencapai kondisi ideal yaitu 100 persen. Sedangkan rata-rata lama sekolah pada tahun 2013 adalah sebesar 9,57 yang berarti bahwa secara umum penduduk di Kabupaten Samosir sudah menyelesaikan tingkat pendidikan sampai jenjang SLTP, yang berarti bahwa kepedulian masyarakat terhadap pendidikan di Kabupaten Samosir masih jauh dari kondisi ideal.

Berdasarkan beberapa sub komponen di atas, maka diperoleh indeks pengetahuan tahun 2013 yang berasal dari rata-rata tertimbang angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah sebesar 86,59 dibutuhkan sekitar 13,41 point lagi untuk mencapai kondisi ideal dari tingkat pengetahuan.

Pada umumnya, kemajuan suatu negara dapat diukur dengan tingkat pengetahuan yang sejalan dengan tingkat pembangunan. Sehingga semakin maju pembangunan suatu negara/daerah di bidang pendidikan maka tingkat pengetahuan pun akan semakin tinggi, yang berarti kualitas pendidikan tinggi.

5.1.3 Tingkat Daya Beli

Tingkat daya beli digunakan untuk mengukur standar hidup layak. Indikator ini dipengaruhi pengetahuan yang dimiliki serta peluang yang ada untuk merealisasikan pengetahuan dalam berbagai bentuk barang/jasa sebagai pengeluaran. Sehingga dengan pendapatan yang ada manusia dapat menciptakan daya beli untuk memenuhi berbagai kebutuhannya.

Dalam penghitungan tingkat daya beli digunakan pendekatan pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan dengan tingkat inflasi di daerah masing-masing. Penyesuaian ini diperlukan untuk menstandarkan tingkat harga yang berlaku di masing-masing daerah. Tingkat pengeluaran per kapita yang sama di suatu daerah belum tentu menunjukkan daya beli terhadap barang dan jasa yang sama karena tingkat harga di setiap daerah itu berbeda dan selera/pola konsumsi masyarakat berbeda, oleh sebab itu pengeluaran per kapita ini terlebih dahulu disesuaikan untuk dapat mengukur tingkat daya beli yang nyata.

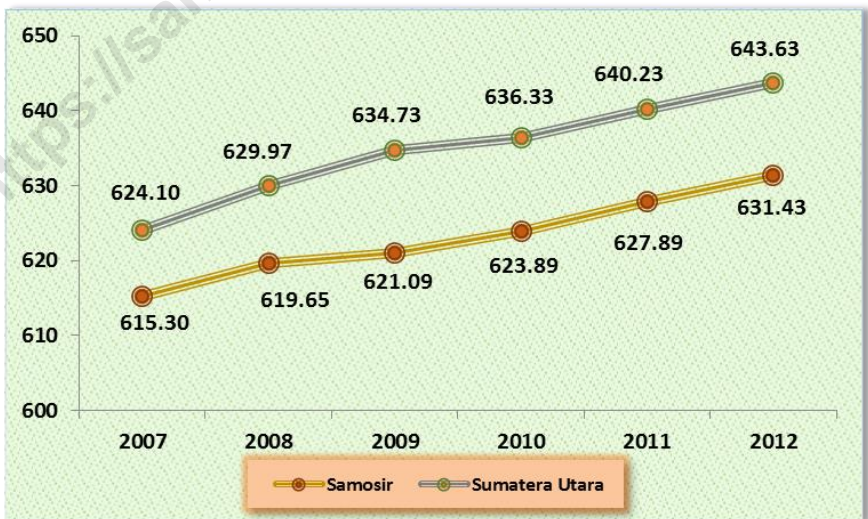
Pada umumnya kondisi perekonomian yang semakin membaik, yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang positif akan berpengaruh terhadap semakin membaiknya daya beli atau pengeluaran riil per kapita masyarakat di daerah tertentu.

Pada tahun 2013, pengeluaran riil per kapita penduduk Samosir sebesar Rp. 634.560 mengalami kenaikan bila dibandingkan pada tahun 2012 yaitu sebesar Rp. 631.430 dan sedikit lebih tinggi dibanding dengan daya beli penduduk di sekitar Kabupaten Samosir yaitu Humbang

Hasundutan sebesar Rp. 624.500 dan Pakpak Barat adalah Rp. 624.120. Akan tetapi, daya beli penduduk Kabupaten Samsir tersebut masih di bawah Kabupaten berbatasan lainnya yang lebih dahulu mekar yaitu Tapanuli Utara yaitu Rp. 642.830 dan Toba Samsir yaitu Rp. 655.680.

Namun jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara secara umum, dapat dikatakan bahwa standar hidup penduduk di Samsir masih di bawah Provinsi Sumatera Utara yaitu Rp. 646.830. Hal ini menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Samsir masih lebih rendah dibandingkan kabupaten sekitar khususnya dan Provinsi Sumatera Utara umumnya berdasarkan tingkat pengeluaran riil per kapita.

Gambar 5.4
Tingkat Daya Beli Penduduk Samsir dan Sumatera Utara
Tahun 2007 – 2013
(000 Rp)



Sumber : BPS Propinsi Sumatera Utara, 2013

Berdasarkan tingkat daya beli pada gambar 5.4 di atas, maka dapat dihitung indeks daya beli penduduk Kabupaten Samosir tahun 2013 adalah sebesar 62,73 yang berarti masih jauh dari kondisi ideal yaitu 100.

5.2. STATUS PEMBANGUNAN MANUSIA

Dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), UNDP membagi tingkatan status pembangunan manusia suatu negara atau wilayah ke dalam empat golongan/kriteria yaitu :

1. **Rendah** dengan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah kurang dari 50
2. **Menengah bawah** dengan nilai Indeks Pembangunan Manusia berada diantara 50 sampai 66.
3. **Menengah atas** dengan nilai Indeks Pembangunan Manusia berada diantara 66 sampai 80.
4. **Tinggi** dengan nilai Indeks Pembangunan Manusia adalah 80 keatas.

Berdasarkan keempat kriteria di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa jika status pembangunan manusia berada pada kriteria rendah, hal ini berarti kinerja pembangunan manusia daerah tersebut masih memerlukan perhatian khusus untuk mengejar ketertinggalannya. Begitu juga jika status pembangunan manusia berada pada kriteria menengah, hal ini berarti pembangunan manusia masih perlu ditingkatkan. Jika daerah tersebut mempunyai status pembangunan manusia tinggi hal ini berarti kinerja pembangunan manusia daerah tersebut sudah baik/optimal. Maka perlu dipertahankan supaya kualitas manusia tersebut lebih produktif

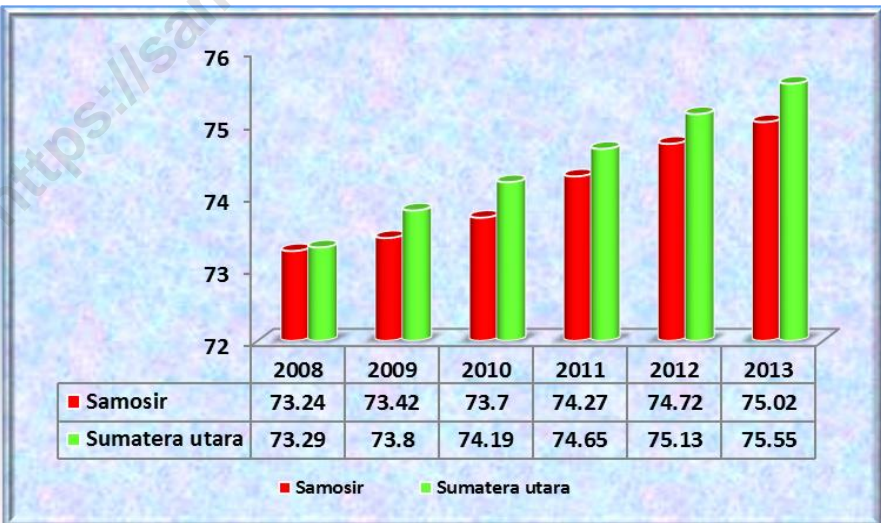
sehingga memiliki produktivitas yang tinggi. Berikut ini disajikan uraian tingkatan status pembangunan manusia dengan kriteria sebagai berikut :

Tabel 5.2
Tingkatan Status Pembangunan Manusia

Tingkatan Status	Kriteria
Rendah	$IPM < 50$
Menengah bawah	$50 \leq IPM < 66$
Menengah atas	$66 \leq IPM \leq 80$
Tinggi	$IPM > 80$

Sumber : BPS Propinsi Sumatera Utara

Gambar 5.5
IPM Kabupaten Samsir dan Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2008 – 2013



Sumber : BPS Propinsi Sumatera Utara, 2013

Pada gambar 5.5 terlihat bahwa selama 5 (lima) tahun terakhir IPM Kabupaten Samsir mengalami kenaikan yaitu tahun 2013 sebesar 75,02, tahun 2012 sebesar 74,72, tahun 2011 sebesar 74,27, tahun 2010 sebesar 73,70, dan tahun 2009 sebesar 73,42. Kondisi IPM untuk tahun 2013 ini berada pada kriteria Menengah Atas. Kondisi ini terus meningkat dan diperlukan upaya yang lebih keras lagi untuk meningkatkan status pembangunan manusia di Kabupaten Samsir menjadi berstatus Tinggi. Adapun cara yang bisa ditempuh adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikan, kualitas kesehatan dan juga kesempatan untuk memperoleh penghidupan yang layak dari aspek/sudut pandang ekonomi.

Tabel. 5.3
Komponen IPM dan Status Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Samsir dan Sumatera Utara
Tahun 2013

Komponen IPM	Samsir		Sumatera Utara	
	Nilai	Status	Nilai	Status
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Angka Harapan Hidup (<i>tahun</i>)	70,01		69,90	
Angka Melek Huruf (%)	97,99		97,84	
Rata-rata Lama sekolah (<i>tahun</i>)	9,57		9,13	
Daya Beli (<i>000 Rp</i>)	634,56		646,83	
IPM	75,02	Menengah Atas	75,55	Menengah Atas

Sumber : BPS Propinsi Sumatera Utara, 2013

KESIMPULAN

B A B 6

<https://samosirkab.go.id>

KESIMPULAN

6

Desentralisasi pembangunan yang biasa disebut dengan otonomi daerah memberikan peluang kepada Kabupaten/ Kota untuk melakukan perencanaan program kerja dan pencapaian tujuan pembangunan daerah. Kabupaten Samosir yang merupakan kabupaten muda yang terbentuk sejak tahun 2003, memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan berbagai langkah representatif dalam mengambil kebijakan yang bermanfaat bagi pengembangan Kabupaten Samosir.

Untuk melihat perkembangan dan hubungan IPM dengan pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat, maka pemerintah Kabupaten Samosir melalui Bappeda melakukan kerjasama dalam rangka penyusunan Publikasi ASPM (Analisis Situasi Pembangunan Manusia) keadaan tahun 2013. Melalui publikasi ASPM tahun 2013, diharapkan pemerintah selaku pengambil kebijakan dapat menggunakan data IPM sebagai dasar pengambilan setiap keputusan.

Adapun komponen-komponen penyusun IPM di Kabupaten Samosir antara lain :

1. Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup penduduk Kabupaten Samosir tercatat sekitar 70,01 tahun keadaan tahun 2013, yang berarti bahwa rata-rata usia harapan hidup penduduk di Kabupaten Samosir mendekati 70 tahun.

2. Indeks Pengetahuan

a. Angka Melek Huruf

Pada tahun 2013 angka melek huruf di Kabupaten Samosir adalah 97,99 persen dan hampir sebanding dengan angka melek huruf Propinsi Sumatera Utara yaitu 97,84 persen.

b. Angka Buta Huruf

Angka buta huruf Kabupaten Samosir pada tahun 2013 yaitu sebesar 2,01 persen. Angka ini masih lebih rendah bila dibandingkan dengan angka buta huruf Provinsi Sumatera Utara yaitu sebesar 2,16 persen.

c. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah penduduk 10 tahun ke atas di Kabupaten Samosir keadaan tahun 2013 yaitu sebesar 9,57 tahun.

3. Tingkat Daya Beli

Pengeluaran riil per kapita penduduk Samosir adalah sebesar Rp. 634.560,- dan jika dibandingkan dengan pengeluaran riil perkapita Provinsi Sumatera Utara masih di bawah yaitu Rp. 646.830,-

Kondisi IPM untuk tahun 2013 ini berada pada kriteria Menengah Atas, yaitu 75,02. Kondisi ini terus meningkat dan diperlukan upaya yang lebih keras lagi untuk meningkatkan status pembangunan manusia di Kabupaten Samosir menjadi berstatus Tinggi. Adapun cara yang bisa ditempuh adalah meningkatkan kualitas pendidikan, kualitas kesehatan dan penghidupan yang layak dari aspek/sudut pandang ekonomi.

<https://samosirkab.bps.go.id>

naripanal

Lampiran 1.1
Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan

Total Area, Population and Population Density By Sub Regency
2013

No.	Kecamatan <i>Sub Regency</i>	Luas Wilayah <i>Total Area</i> (km ²)	Penduduk <i>Populations</i> (jiwa/population)	Kepadatan Penduduk <i>Population Density</i> (jiwa/population) per km ²
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1.	Sianjur Mulamula	140,24	9 311	66,39
2.	Harian	560,45	8 010	14,29
3.	Sitotio	50,76	7 260	143,03
4.	Onan Runggu	60,89	10 525	172,85
5.	Nainggolan	87,86	12 074	137,42
6.	Palipi	129,55	16 392	126,53
7.	Ronggur Nihuta	94,87	8 514	89,74
8.	Pangururan	121,43	29 970	246,81
9.	Simanindo	198,20	19 868	100,24
Kabupaten Samosir <i>Samosir Regency</i>		1 444,25	121 924	84,42

Sumber : BPS Kabupaten Samosir, 2013

Lampiran 1.2
Jumlah Penduduk, Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan
Population, Sex and Sex Ratio By Sub Regency
2013

No.	Kecamatan Sub Regency	Jenis Kelamin/Sex		Jumlah Total (jiwa/population)	Rasio Jenis Kelamin Sex Ratio
		Laki-laki Male (jiwa/population)	Perempuan Female (jiwa/population)		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1.	Sianjur Mulamula	4 698	4 613	9 311	101,84
2.	Harian	3 955	4 055	8 010	97,53
3.	Sitotio	3 624	3 636	7 260	99,67
4.	Onan Runggu	5 193	5 332	10 525	97,39
5.	Nainggolan	5 948	6 126	12 074	97,09
6.	Palipi	8 129	8 263	16 392	98,38
7.	Ronggur Nihuta	4 211	4 303	8 514	97,86
8.	Pangururan	14 969	15 001	29 970	99,79
9.	Simanindo	9 861	10 007	19 868	98,54
Kabupaten Samosir <i>Samosir Regency</i>		60 588	61 336	121 924	98,78

Sumber : BPS Kabupaten Samosir, 2013

Lampiran 1.3
Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Percentage of Population By Age Group and Sex
2013
(jiwa/population)

Kelompok Umur <i>Age Group</i>	Laki-laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
[1]	[2]	[3]	[4]
0 – 4	7 580	7 367	14 947
5 – 9	7 596	7 243	14 839
10 – 14	7 647	6 949	14 596
15 – 19	6 554	5 800	12 354
20 - 24	3 652	2 570	6 222
25 - 29	3 721	3 430	7 151
30 – 34	3 715	3 544	7 259
35 - 39	3 456	3 249	6 705
40 – 44	3 284	3 453	6 737
45 – 49	3 081	3 412	6 493
50 – 54	2 828	3 579	6 407
55 – 59	2 604	3 309	5 913
60 – 64	1 935	2 615	4 550
65 – 69	1 312	1 900	3 212
70 – 74	899	1 395	2 294
75 +	724	1 521	2 245
Kabupaten Samosir <i>Samosir Regency</i>	60 588	61 336	121 924

Sumber : BPS Kabupaten Samosir, 2013

Lampiran 1.4
Persentase Penduduk Kabupaten Samosir Berusia 10 Tahun Ke Atas
Menurut Partisipasi Sekolah dan Jenis Kelamin
Percentage of Population of Samosir Regency 10 Years of Age
and Over by Schooling Participation and Sex and Sex
2013
(persen/ percent)

No.	Status Pendidikan <i>Educational Attainment</i>	Laki-laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1.	Tidak/Belum Pernah Sekolah <i>Not Yet/Never Attended School</i>	0,71	2,58	1,66
2.	Masih Sekolah <i>Still Attending School</i>	29,96	28,48	29,21
	- Tamat SD <i>Primary School</i>	12,47	12,02	12,24
	- Tamat SLTP <i>Junior High School</i>	8,65	9,11	8,88
	- Tamat SLTA <i>Senior High School</i>	7,50	6,18	6,83
	- Tamat Universitas <i>University</i>	1,34	1,17	1,25
3.	Tidak Bersekolah Lagi <i>Unfinished School</i>	69,33	68,94	69,13
Kabupaten Samosir <i>Samosir Regency</i>		100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS-Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2013

Source : BPS-National Socio Economic Survey 2013

Lampiran 1.5
Persentase Penduduk Kabupaten Samosir Berusia 10 Tahun Ke Atas
Menurut Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki dan Jenis Kelamin
Percentage of Population of Samosir Regency 10 Years of Age
and Over by Certificate of Attainment and Sex
2013
 (persen/percent)

No.	Ijazah/STTB Tertinggi <i>Certificate of Attainment</i>	Laki-laki Perempuan		Jumlah <i>Total</i>
		Male	Female	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1.	Tidak/Belum Pernah Sekolah <i>Not Yet/Never Attended School</i>	0,71	2,58	1,66
2.	Tidak/Belum Tamat SD/ <i>Never/Not Yet Passing Primary School</i>	21,00	26,95	24,01
3.	Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan/ <i>Educational Attainment :</i>			
	- Tamat SD/ <i>Primary School</i>	19,60	21,17	20,40
	- Tamat SLTP/ <i>Junior High School</i>	21,23	18,13	19,66
	- Tamat SLTA/ <i>Senior High School</i>	27,88	22,11	24,96
	- Tamat SMTA Kejuruan / <i>Vocational Senior High School</i>	5,81	4,57	5,18
	- Diploma I & II/ <i>Diploma I & II</i>	0,18	0,27	0,23
	- Diploma III/ <i>Diploma III</i>	0,96	1,32	1,14
	- Diploma IV/S-1 ke atas/ <i>Diploma</i> <i>IV/University Graduated</i>	2,61	2,90	2,176
Kabupaten Samosir <i>Samosir Regency</i>		100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS-Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2013

Source : BPS-National Socio Economic Survey 2013

Lampiran 1.6
Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai Tempat Tinggal (m²)
Percentage of Household by Floor Area of Dwelling Unit (m²)
2013
(persen/ percent)

No.	Luas Lantai Tempat Tinggal (m ²) <i>Floor Area of Dwelling Unit (m²)</i>	Persentase <i>Percentage (%)</i>
[1]	[2]	[3]
1.	< 20	2,10
2.	20 – 49	60,25
3.	50 – 59	7,77
4.	60 - 99	22,64
5.	100 – 149	5,34
6.	150 +	1,90
Kabupaten Samosir <i>Samosir Regency</i>		100,00

Sumber : BPS-Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2013

Source : BPS-National Socio Economic Survey 2013

Lampiran 1.7
Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Lantai Terluas dari Tempat Tinggal
Percentage of Household by Primary Floor Material of the Dwelling Unit
2007 – 2013
(persen/ percent)

No	Jenis Lantai Terluas <i>Primary Floor Material</i>	Persentase <i>Percentage (%)</i>					
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1.	Tanah <i>Land</i>	2,84	2,19	5,11	1,13	0,76	0,97
2.	Bukan Tanah <i>Not Land</i>	97,16	97,81	94,89	98,87	99,24	99,03
Kabupaten Samosir <i>Samosir Regency</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS-Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2008-2013

Source : BPS-National Socio Economic Survey 2008-2013

Lampiran 1.8
Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Dinding Terluas
Percentage of Household by Main Source of Drinking Water
2007 – 2013
 (persen/ percent)

No.	Jenis Dinding Terluas <i>Wall Main Material</i>	Persentase <i>Percentage (%)</i>					
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1.	Tembok <i>Brick</i>	22,18	23,79	29,00	24,17	30,53	26,84
2.	Kayu <i>Wood</i>	76,55	75,43	70,37	75,15	68,75	73,09
3.	Bambu <i>Bamboo</i>	0,79	0,47	0,19	0,00	0,36	0,00
4.	Lainnya <i>Others</i>	0,48	0,31	0,44	0,68	0,36	0,08
Kabupaten Samsir <i>Samosir Regency</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS-Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2008-2013

Source : BPS-National Socio Economic Survey 2008-2013

Lampiran 1.9
Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Utama Air Minum
Percentage of Household by Main Source of Drinking Water
2007 – 2013
 (persen/ percent)

No.	Sumber Utama Air Minum <i>Main Source of Drinking Water</i>	Persentase <i>Percentage (%)</i>					
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1.	Ledeng /Air Kemasan <i>Pipe Water/ Bottled Water</i>	6,75	8,06	11,55	9,17	10,32	11,68
2.	Pompa / Sumur <i>Pump/Well</i>	20,21	10,63	11,77	6,71	6,11	5,47
3.	Mata Air <i>Spring</i>	30,72	51,86	34,04	37,91	37,12	49,12
4.	Lainnya <i>Others</i>	42,32	29,44	42,64	46,21	46,46	33,73
Kabupaten Samosir <i>Samosir Regency</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS-Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2008-2013

Source : BPS-National Socio Economic Survey 2008-2013

Lampiran 1.10
Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Pembuangan Akhir Tinja
Percentage of Household by Sanitation Facility
2013
 (persen/ percent)

No.	Fasilitas Pembuangan Air Besar <i>Sanitation Facility</i>	Persentase <i>Percentage (%)</i>
[1]	[2]	[3]
1.	Kakus dengan Tanki Septik <i>Toilet with Septic Tank</i>	50,59
2.	Kolam /Sawah <i>Pond/Rice /Field</i>	0,53
3.	Sungai/Danau <i>River/Lake</i>	0,32
4.	Lainnya <i>Others</i>	48,56
Kabupaten Samosir <i>Samosir Regency</i>		100,00

Sumber : BPS-Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2013

Source : BPS-National Socio Economic Survey 2013

Lampiran 2.1
Angka Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Utara
Life Expectancy by Regency/City in Sumatera Utara Province
(Tahun/year)
2009-2013

No.	Kabupaten/Kota <i>Regency/City</i>	Angka Harapan Hidup/ <i>Life Expentancy</i>				
		2009	2010	2011	2011	2013
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	N i a s	69,38	69,60	69,77	69,94	70,12
2.	Mandailing Natal	63,54	63,62	63,70	63,79	63,79
3.	Tapanuli Selatan	67,03	67,21	67,34	67,48	67,61
4.	Tapanuli Tengah	67,91	68,11	68,26	68,40	68,57
5.	Tapanuli Utara	69,32	69,70	70,02	70,33	70,47
6.	Toba Samosir	70,61	70,68	70,75	70,82	70,86
7.	LabuhanBatu	69,20	69,54	70,02	70,23	70,25
8.	A s a h a n	68,84	68,98	69,13	69,28	69,32
9.	Simalungun	68,85	68,96	69,08	69,20	69,24
10.	D a i r i	68,15	68,40	68,59	68,78	68,99
11.	K a r o	72,09	72,19	72,29	72,38	72,44
12.	Deli Serdang	70,36	70,65	70,88	71,11	71,31
13.	Langkat	69,03	69,07	69,12	69,16	69,25
14.	Nias Selatan	69,60	70,01	70,36	70,70	70,86
15.	HumbangHasundutan	67,78	67,87	67,96	68,06	68,09
16.	Pakpak Barat	67,32	67,60	67,81	68,03	68,20
17.	Samosir	69,62	69,73	69,84	69,95	70,01
18.	SerdangBedagai	68,89	68,98	69,08	69,18	69,27
19.	Batu Bara	68,46	68,58	68,71	68,83	68,92
20.	PadangLawas Utara	66,53	66,57	66,62	66,67	66,76
21.	PadangLawas	66,97	67,03	67,09	67,15	67,19
22.	LabuhanBatu Selatan	69,62	69,95	70,23	70,50	70,67
23.	LabuhanBatu Utara	69,22	69,62	69,97	70,31	70,47
24.	Nias Utara	69,06	69,15	69,24	69,33	69,39
25.	Nias Barat	69,07	69,15	69,23	69,31	69,40
26.	Sibolga	70,17	70,23	70,29	70,34	70,39
27.	TanjungBalai	70,05	70,43	70,76	71,09	71,25
28.	PematangSiantar	72,00	72,16	72,29	72,42	72,54
29.	TebingTinggi	71,20	71,33	71,47	71,60	71,68
30.	M e d a n	71,71	71,91	72,06	72,21	72,37
31.	B i n j a i	71,65	71,77	71,89	72,01	72,07
32.	PadangSidempuan	69,47	69,59	69,72	69,84	69,89
33.	GunungSitoli	69,5	69,95	70,29	70,63	70,82
Sumatera Utara		69,35	69,50	69,65	69,81	69,90

Sumber : BPS Propinsi Sumatera Utara

Lampiran 2.2
Angka Melek Huruf Menurut Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Utara
Literacy Rate by Regency/City in Sumatera Utara Province
(Persen/percent)
2009– 2013

No.	Kabupaten/Kota <i>Regency/City</i>	Melek Huruf/Literacy Rate				
		2009	2010	2011	2012	2013
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Nias	89,75	90,44	90,78	90,79	90,80
2.	Mandailing Natal	99,32	99,33	99,34	99,34	99,36
3.	Tapanuli Selatan	99,79	99,81	99,83	99,83	99,88
4.	Tapanuli Tengah	95,75	95,78	95,82	95,84	96,40
5.	Tapanuli Utara	98,57	98,59	98,60	98,62	98,68
6.	Toba Samsir	98,34	98,35	98,49	98,50	98,57
7.	Labuhan Batu	97,94	97,95	97,96	98,32	99,08
8.	Asahan	96,79	96,90	97,70	98,00	98,27
9.	Simalungun	97,37	97,50	97,57	97,58	97,62
10.	Dairi	97,95	98,09	98,70	98,71	98,76
11.	Karo	98,69	98,69	98,72	98,73	99,08
12.	Deli Serdang	98,35	98,53	98,64	98,66	99,35
13.	Langkat	96,85	96,92	97,27	97,48	97,98
14.	Nias Selatan	85,19	85,19	85,28	85,36	85,38
15.	Humbang Hasundutan	98,21	98,21	98,22	98,22	98,23
16.	Pakpak Barat	96,51	96,52	96,53	97,51	97,52
17.	Samsir	96,61	96,61	97,47	97,92	97,99
18.	Serdang Bedagai	97,44	97,70	97,80	97,81	97,94
19.	Batu Bara	95,21	95,25	95,27	96,10	97,18
20.	Padang Lawas Utara	99,21	99,21	99,53	99,53	99,59
21.	Padang Lawas	99,65	99,65	99,66	99,66	99,67
22.	Labuhan Batu Selatan	98,82	98,84	98,93	98,94	99,05
23.	Labuhan Batu Utara	98,16	98,17	98,53	98,90	99,35
24.	Nias Utara	89,19	89,19	89,30	89,31	91,02
25.	Nias Barat	84,30	84,30	84,46	84,47	84,48
26.	Sibolga	99,29	99,29	99,31	99,33	99,34
27.	Tanjung Balai	98,98	98,98	99,02	99,09	99,43
28.	Pematang Siantar	99,41	99,45	99,47	99,47	99,67
29.	Tebing Tinggi	98,61	98,70	99,02	99,03	99,54
30.	Medan	99,31	99,36	99,38	99,52	99,57
31.	Binjai	99,18	99,19	99,20	99,22	99,47
32.	Padang Sidempuan	99,62	99,70	99,72	99,74	99,77
33.	Gunung Sitoli	94,75	94,75	94,86	94,88	94,92
	Sumatera Utara	97,15	97,32	97,46	97,51	97,84

Sumber : BPS Propinsi Sumatera Utara

Lampiran 2.3
Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
Menurut Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Utara
Mean Years of Schooling by Regency/City in Sumatera Utara Province
(Tahun/year)
2009- 2013

No.	Kabupaten/Kota <i>Regency/City</i>	Rata-rata Lama Sekolah <i>Mean Years of Schooling</i>				
		2009	2010	2011	2012	2013
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	N i a s	6,41	6,41	6,42	6,46	6,47
2.	Mandailing Natal	7,71	7,80	7,92	7,96	7,99
3.	Tapanuli Selatan	8,93	8,94	8,95	8,97	8,98
4.	Tapanuli Tengah	8,12	8,13	8,15	8,19	8,21
5.	Tapanuli Utara	8,82	8,85	8,97	9,03	9,22
6.	Toba Samsir	9,74	9,80	9,85	9,87	9,89
7.	LabuhanBatu	8,32	8,53	8,55	8,78	8,79
8.	A s a h a n	7,67	7,67	7,92	8,17	8,33
9.	Simalungun	8,69	8,70	8,71	8,81	8,82
10.	D a i r i	8,53	8,55	8,91	8,95	8,97
11.	K a r o	9,09	9,10	9,22	9,29	9,60
12.	Deli Serdang	9,11	9,50	9,56	9,56	9,68
13.	Langkat	8,72	8,76	8,78	8,80	8,82
14.	Nias Selatan	6,32	6,33	6,40	6,44	6,47
15.	HumbangHasundutan	9,05	9,05	9,31	9,34	9,38
16.	Pakpak Barat	8,14	8,16	8,22	8,49	8,81
17.	Samsir	9,51	9,52	9,54	9,55	9,57
18.	SerdangBedagai	8,63	8,64	8,65	8,67	8,69
19.	Batu Bara	7,33	7,45	7,54	7,88	8,03
20.	PadangLawas Utara	8,16	8,45	8,89	8,93	8,97
21.	PadangLawas	8,12	8,13	8,40	8,43	8,46
22.	LabuhanBatu Selatan	8,18	8,21	8,24	8,36	8,63
23.	LabuhanBatu Utara	7,81	7,91	8,01	8,26	8,71
24.	Nias Utara	5,81	6,10	6,13	6,45	6,46
25.	Nias Barat	5,36	5,56	5,88	6,17	6,19
26.	Sibolga	9,63	9,63	9,72	9,77	10,08
27.	TanjungBalai	8,80	8,80	8,89	9,08	9,09
28.	PematangSiantar	10,81	0,85	10,89	10,93	10,97
29.	TebingTinggi	9,81	9,85	9,90	9,92	10,14
30.	M e d a n	10,80	10,84	10,86	10,86	10,90
31.	B i n j a i	9,85	9,89	9,99	10,00	10,08
32.	PadangSidempuan	10,10	10,19	10,21	10,36	10,37
33.	GunungSitoli	8,42	8,42	8,45	8,48	8,51
	Sumatera Utara	8,65	8,85	8,91	8,91	9,13

Sumber : BPS Propinsi Sumatera Utara

Lampiran 2.4
Pengeluaran Riil Per Kapita Yang Disesuaikan Menurut Kabupaten/Kota
di Propinsi Sumatera Utara

The Real Cost Per capita by Regency/City in Sumatera Utara Province
2009–2013

No.	Kabupaten/Kota <i>Regency/City</i>	Pengeluaran Riil Per Kapita(Rp.000) <i>The Real Cost Per capita</i>				
		2009	2010	2011	2012	2013
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Nias	605,61	607,16	610,40	614,77	618,20
2.	Mandailing Natal	633,72	636,51	640,33	644,44	647,85
3.	Tapanuli Selatan	639,12	642,53	647,03	650,18	653,60
4.	Tapanuli Tengah	616,80	618,97	623,03	626,92	630,49
5.	Tapanuli Utara	629,88	632,74	636,35	639,71	642,83
6.	Toba Samsir	643,12	646,36	649,91	652,85	655,68
7.	LabuhanBatu	634,24	635,23	639,53	643,08	646,10
8.	Asahan	627,64	631,24	634,67	637,36	640,40
9.	Simalungun	628,59	631,62	636,82	640,30	642,32
10.	Dairi	623,85	627,70	629,29	632,23	635,10
11.	Karo	619,83	625,48	629,36	633,61	636,24
12.	Deli Serdang	630,84	632,41	636,39	639,77	643,51
13.	Langkat	624,51	628,21	632,54	636,08	639,03
14.	Nias Selatan	592,13	595,80	604,39	608,04	611,02
15.	HumbangHasundutan	611,20	614,37	617,64	621,32	624,50
16.	Pakpak Barat	611,52	614,58	617,98	621,39	624,12
17.	Samsir	621,09	623,89	627,89	631,43	634,56
18.	SerdangBedagai	626,30	628,82	632,71	637,36	640,64
19.	Batu Bara	626,30	628,90	633,10	634,83	636,82
20.	PadangLawas Utara	632,03	634,18	638,06	641,80	645,38
21.	PadangLawas	622,29	625,64	630,00	634,60	637,97
22.	LabuhanBatu Selatan	628,88	630,27	634,67	638,28	641,73
23.	LabuhanBatu Utara	631,74	632,42	636,80	641,05	644,49
24.	Nias Utara	603,54	607,51	609,48	612,58	615,94
25.	Nias Barat	603,74	607,71	611,91	614,83	618,17
26.	Sibolga	626,42	629,45	633,58	635,65	638,23
27.	TanjungBalai	620,92	623,19	628,81	628,91	631,55
28.	PematangSiantar	632,28	634,88	639,01	642,02	644,74
29.	TebingTinggi	635,94	639,39	642,49	646,89	650,73
30.	Medan	632,32	635,11	639,60	643,76	646,92
31.	Binjai	630,45	633,37	637,70	642,85	646,49
32.	PadangSidempuan	625,45	629,11	632,81	636,32	639,36
33.	GunungSitoli	610,39	611,95	615,91	618,19	621,32
	Sumatera Utara	634,73	636,33	640,23	643,63	646,83

Sumber : BPS Propinsi Sumatera Utara

Lampiran 2.5
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota
di Propinsi Sumatera Utara

Human Development Index (HDI) by Regency/City in Sumatera Utara Province
2009–2013

No.	Kabupaten /Kota <i>Regency/City</i>	IPM / HDI				
		2009	2010	2011	2012	2013
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Nias	68,26	68,66	69,09	69,55	69,93
2.	Mandailing Natal	70,27	70,60	71,04	71,44	71,72
3.	Tapanuli Selatan	73,64	74,02	74,45	74,78	75,13
4.	Tapanuli Tengah	70,91	71,21	71,63	72,04	72,55
5.	Tapanuli Utara	73,85	74,31	74,86	75,33	75,81
6.	Toba Samsir	76,22	76,55	76,93	77,21	77,49
7.	Labuhan Batu	73,61	74,03	74,65	75,29	75,71
8.	Asahan	72,16	72,54	73,25	73,80	74,23
9.	Simalungun	73,13	73,46	73,94	74,35	74,55
10.	Dairi	72,38	72,86	73,49	73,86	74,22
11.	Karo	74,84	75,34	75,79	76,22	76,76
12.	Deli Serdang	74,67	75,28	75,78	76,17	76,82
13.	Langkat	72,82	73,18	73,62	73,98	74,38
14.	Nias Selatan	66,27	66,79	67,72	68,23	68,58
15.	Humbang Hasundutan	71,64	71,94	72,43	72,80	73,09
16.	Pakpak Barat	70,36	70,77	71,20	72,00	72,54
17.	Samsir	73,42	73,70	74,27	74,72	75,02
18.	Serdang Bedagai	72,94	73,25	73,64	74,07	74,41
19.	Batu Bara	71,25	71,62	72,08	72,71	73,26
20.	Padang Lawas Utara	72,11	72,52	73,25	73,59	73,96
21.	Padang Lawas	71,68	71,98	72,55	72,96	73,27
22.	Labuhan Batu Selatan	73,52	73,84	74,38	74,90	75,48
23.	Labuhan Batu Utara	73,10	73,45	74,14	74,92	75,70
24.	Nias Utara	67,36	67,94	68,18	68,71	69,39
25.	Nias Barat	65,96	66,46	67,10	67,59	67,91
26.	Sibolga	74,82	75,08	75,50	75,73	76,19
27.	Tanjung Balai	73,64	74,03	74,72	75,06	75,44
28.	Pematang Siantar	77,18	77,51	77,93	78,27	78,62
29.	Tebing Tinggi	76,10	76,49	76,91	77,34	77,96
30.	Medan	76,99	77,36	77,81	78,25	78,62
31.	Binjai	76,09	76,41	76,88	77,36	77,79
32.	Padang Sidempuan	74,77	75,21	75,58	76,04	76,31
33.	Gunung Sitoli	71,33	71,67	72,21	72,61	72,99
Sumatera Utara		73,80	74,19	74,65	75,13	75,55

Sumber : BPS Propinsi Sumatera Utara

Lampiran 2.6

Peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Sumatera Utara secara Nasional dan Propinsi Sumatera Utara

Nationally and Sumatera Utara Provincially Rate of Human Development Index (HDI) of
by Regency/City in Sumatera Utara Province

2009-2013

No.	Kabupaten /Kota Regency/City	Prop. Sumut / Sumut Province				
		2009	2010	2011	2012	2013
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Nias	30	30	30	30	30
2.	Mandailing Natal	29	29	29	29	29
3.	Tapanuli Selatan	11	13	13	15	15
4.	Tapanuli Tengah	27	27	27	27	27
5.	Tapanuli Utara	10	10	10	10	10
6.	Toba Samosir	3	3	3	5	5
7.	Labuhan Batu	13	13	12	11	11
8.	Asahan	21	21	22	21	20
9.	Simalungun	16	16	17	17	17
10.	Dairi	20	20	20	20	21
11.	Karo	6	6	6	6	7
12.	Deli Serdang	9	7	7	7	6
13.	Langkat	19	19	19	19	19
14.	Nias Selatan	32	32	32	32	32
15.	Humbang Hasundutan	24	24	24	24	25
16.	Pakpak Barat	28	28	28	28	28
17.	Samosir	15	15	15	16	16
18.	Serdang Bedagai	18	18	18	18	18
19.	Batu Bara	26	26	26	25	24
20.	Padang Lawas Utara	22	22	22	22	22
21.	Padang Lawas	23	23	23	23	23
22.	Labuhan Batu Selatan	14	14	14	14	13
23.	Labuhan Batu Utara	17	17	16	13	12
24.	Nias Utara	31	31	31	31	31
25.	Nias Barat	33	33	33	33	33
26.	Sibolga	7	9	9	9	9
27.	Tanjung Balai	12	11	11	12	14
28.	Pematang Siantar	1	1	1	1	1
29.	Tebing Tinggi	4	4	4	4	3
30.	Medan	2	2	2	2	2
31.	Binjai	5	5	5	3	4
32.	Padang Sidempuan	8	8	8	8	8
33.	Gunung Sitoli	25	25	25	26	26
	Sumatera Utara	8	8	8	8	8

Sumber : BPS Propinsi Sumatera Utara

Lampiran 2.7
Reduksi Shortfall Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota
di Sumatera Utara secara Nasional dan Propinsi Sumatera Utara
Nationally and Sumatera Utara Provincially Shortfall Reduction of Human Development
Index (HDI) by Regency/City in Sumatera Utara
2008-2013

No.	Kabupaten /Kota Regency/City	2008-2009	2009/2010	2010-2011	2011/2012	2012-2013
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[5]	[6]
1.	Nias	2,21	1,26	1,37	1,49	1,22
2.	Mandailing Natal	1,19	1,11	1,47	1,38	1,00
3.	Tapanuli Selatan	1,16	1,42	1,66	1,29	1,40
4.	Tapanuli Tengah	1,45	1,01	1,47	1,45	1,81
5.	Tapanuli Utara	1,21	1,75	2,13	1,90	1,92
6.	Toba Samsir	1,91	1,39	1,63	1,24	1,20
7.	Labuhan Batu	1,94	1,62	2,36	2,52	1,71
8.	Asahan	2,07	1,38	2,59	2,03	1,65
9.	Simalungun	2,32	1,38	1,69	1,57	0,77
10.	Dairi	1,31	1,75	2,33	1,38	1,38
11.	Karo	1,62	1,96	1,84	1,76	2,30
12.	Deli Serdang	1,19	2,42	2,01	1,62	2,71
13.	Langkat	2,10	1,32	1,66	1,36	1,55
14.	Nias Selatan	2,00	2,60	1,73	1,59	1,10
15.	Humbang Hasundutan	1,40	1,04	1,77	1,34	1,07
16.	Pakpak Barat	1,35	1,48	1,36	2,79	1,94
17.	Samosir	0,68	1,05	2,18	1,74	1,20
18.	Serdang Bedagai	1,27	1,15	1,43	1,64	1,33
19.	Batu Bara	0,92	1,28	1,62	2,29	2,01
20.	Padang Lawas Utara	0,94	1,47	2,64	1,29	1,40
21.	Padang Lawas	1,84	1,06	2,03	1,51	1,12
22.	Labuhan Batu Selatan	1,34	1,21	2,06	2,03	2,31
23.	Labuhan Batu Utara	1,11	1,31	2,58	3,03	3,12
24.	Nias Utara	-	1,20	1,34	1,65	2,18
25.	Nias Barat	-	1,46	1,92	1,48	1,00
26.	Kota Sibolga	-	1,05	1,69	0,94	1,90
27.	Kota Tanjung Balai	-	1,88	2,24	1,37	1,52
28.	Kota Pematang Siantar	-	1,46	1,88	1,52	1,61
29.	Kota Tebing Tinggi	1,68	1,63	1,80	1,86	2,74
30.	Kota Medan	1,44	1,60	2,00	1,96	1,70
31.	Kota Binjai	0,99	1,38	1,99	2,07	1,88
32.	Kota Padang Sidempuan	1,69	1,74	1,49	1,86	1,14
33.	Kota Gunung Sitoli	1,24	1,19	1,91	1,41	1,39
	Sumatera Utara	1,89	1,49	1,80	1,88	1,69

Sumber : BPS Propinsi Sumatera Utara